

**PEMETAAN TIPOLOGI PEMILIH PPP KABUPATEN  
JEPARA ; SEBUAH STRATEGI PEMENANGAN  
PEMILIHAN UMUM**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat  
Guna Menyelesaikan Akan Gelar  
Magister Ilmu Politik Pada Program Pascasarjana  
Universitas Diponegoro**

**DISUSUN OLEH:**

**ZAMRONI**

**NIM: D4B004084**

**MAGISTER ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2007**

## **PENGESAHAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul

### **PEMETAAN TIPOLOGI PEMILIH PPP KABUPATEN JEPARA: SEBUAH STRATEGI PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM**

Yang disusun oleh Zamroni, NIM D4B004084

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2007-12-03 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji

Drs. Suwantho Adhi, SU

1. Drs. Ahmad Taufiq, Msi

Sekretaris Penguji

Dra. Rina Martini, Msi

2. Nurhidayat Sardini, S.Sos, Msi

Semarang, 21 Juni 2007  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi Magister Ilmu Politik

Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

NIP. 131124 441

## ABSTRAKSI

Pada pemilu 2004, PPP Kabupaten Jepara mengalami perurunan suara yang sangat signifikan jika dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Data menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) pemilu terakhir, PPP mendapatkan perolehan suara terendah pada Pemilu 2004. Untuk itu, diperlukan suatu strategi yang tepat demi memenangkan pemilu di masa yang akan datang. Untuk memperoleh strategi yang tepat, harus didasarkan pada suatu pemetaan tipologi pemilih PPP Kabupaten Jepara.

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemetaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tipologi pemilih PPP Kabupaten Jepara dan merumuskan strategi yang tepat untuk memenangkan PPP dalam pemilu. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran questioner. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan perpaduan antara *purposive sampling* dan *simple random sampling*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa; pertama, pemilih PPP memiliki karakteristik sebagai berikut; dari segi jenis kelamin, baik pemilih pria maupun wanita memiliki komposisi berimbang. (1). Dari segi usia, pemilih PPP sebagian besar merupakan pemilih yang berusia tua. (2). Dari segi agama, pemilih PPP beragama Islam. (3). Dari segi pendidikan, sebagian besar pemilih PPP berpendidikan rendah. (4). Dari segi pekerjaan, mayoritas pemilih PPP bekerja sebagai petani. (5). Dari segi penghasilan, sebagian besar pemilih PPP berpenghasilan rendah. (6). Dari hasil temuan penelitian juga terlihat bahwa sebagian besar pemilih PPP merupakan pengikut dari organisasi massa yang merupakan *underbow* atau berafiliasi dengan PPP. (7). Dari temuan penelitian juga terlihat bahwa pemilih PPP yang menjadi pengikut ormas tersebut sebagian besar aktif di dalam kegiatan ormas yang diikutinya. (8). Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih PPP bukanlah pengurus PPP, dalam arti tidak menjabat dalam struktur organisasi PPP. (9). Penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih PPP, yakni; berasas Islam, pengaruh kiai dan pengaruh keluarga. Kedua, Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memenangi perolehan suara dalam Pemilu yang akan datang PPP adalah dengan melakukan *positioning*. *Positioning* merupakan upaya untuk menetapkan citra tertentu ke dalam benak para pemilih agar tawaran produk dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas dan bermakna. Upaya *positioning* ini harus didasarkan atas temuan penelitian dan hasil analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi partai.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr Wb.**

Puji syukur kami pajatkan kehadiran Allh SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, sampai akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini .

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan study S 2 pada Universitas Diponegoro Semarang, penulis menyusun Tesis ini dengan judul PEMETAAN TIPOLOGI PEMILIH PPP JEPARA (Sebuah Strategi Pemenangan Pemilu)

Tesis ini dapat penulis selesaikan dan penulis ajukan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena dalam kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada

1. Bapak Drs. Soewanto Adhi, selaku Dosen Pembimbing I, atas berbagai saran dan kritik yang telah diberikan,
2. Ibu Dra. Rina Martini, MSi, selaku Dosen Pembimbing II, atas berbagai saran dan kritik serta kesabaran yang telah Beliau berikan dalam membimbing penulis,
3. Bapak Drs. Ahmad Taufiq, M.Si atas saran dan kritik yang sangat inspiratif,
4. Bapak Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Penguji atas kritik yang konstruktif,
5. Istri tercinta, atas kesetiaan dan kesabaran yang telah ditunjukkan dalam mengirngi hari-hari penulis, terutama selama pengerjaan tesis ini,

6. Anak-anakku tersayang, tumpahan cinta kasih penulis, yang juga turut memberi kontribusi signifikan dalam proses penulisan tesis ini.

Dalam menyusun Tesis ini, penulis menyadari banyak kekurangan dalam hal pendataan tata bahasa maupun cara pengungkapan, serta kekurang pengetahuan penulis .

Penulis berharap semoga pembaca berkenan memaklumi keterbatasan penulis, syukur alhamdulillah berkenan menyempurnakannya. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak .

**Wassalamu'alaikum wr wb.**

Jepara, 11 Juli 2007

Penulis

Zamroni

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>.DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
E.1. Tipe Penelitian.....	6
E.2. Definisi Konseptual .....	6
E.3. Definisi Operasional.....	7
E.4. Populasi dan Sampel .....	8
E.4.1. Populasi.....	8
E.4.1. Sampel.....	8
F. Teknik Pengumpulan Data .....	10

F.1. Menyebar Questioner .....	10
F.2. Observasi.....	10
F.3. Studi Pustaka .....	11
G. Teknik Pengolahan Data .....	11
G.1. <i>Recording</i> .....	11
G.2. <i>Editing</i> .....	11
G.3. <i>Indexing</i> .....	11
H. Analisis Data Kualitatif .....	12

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemilu.....	13
B. Partai Politik.....	15
B.1. Partai Politik Sebagai Organisasi .....	15
B.2. Pengertian.....	16
B.2. Fungsi partai politik.....	18
C. Sikap dan Perilaku Politik .....	23
C.1. Perilaku Politik dan Budaya Politik.....	26

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Keadaan Geografis.....	31
B. Keadaan Demografi.....	32
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	35
D. Keadaan Sosial dan Budaya.....	36

E. Sejarah PPP di Jepara.....	41
E.1. Sejarah PPP di Jepara.....	41
E.2. Bagan Struktur Organisasi PPP dan Fungsi-fungsinya.....	43

#### **BAB IV TIPOLOGI PEMILIH PPP JEPARA**

A. Temuan Penelitian.....	49
A.1. Jenis Kelamin Responden .....	49
A.2. Usia Responden .....	50
A.3. Agama Responden .....	51
A.4. Tingkat Pendidikan Responden .....	51
A.5. Pekerjaan Responden .....	52
A.6. Penghasilan Per Bulan Responden .....	53
A.7. Keanggotaan Responden dalam Organisasi Massa .....	54
A.8. Tingkat Keaktifan Responden dalam Organisasi Massa .....	55
A.9. Keterlibatan Responden dalam PPP .....	56
A.10. Alasan Responden Memilih PPP .....	57
B. Analisis Tipologi Pemilih PPP Jepara .....	58
C. Strategi Pemenangan Pemilihan Umum .....	59
C.1. Strategi Memenangkan PPP .....	63
C.2. <i>Positioning</i> Sebagai Strategi Menangkis Ancaman Dari Luar..	67

#### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan.....	70
-----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Perolehan suara PPP Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Tahun Ke Tahun .....	4
Tabel 3.1 Banyaknya Desa/Kelurahan, RW, RT Dan Kepala Keluarga (KK).....	32
Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk Per Km.....	33
Tabel 3.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2005.....	34
Tabel 3.4. Penduduk Kabupaten Jepara 10 tahun keatas Yang bekerja menurut lapangan usaha utama.....	35
Tabel 3.5. Penduduk Kabupaten Jepara yang berumur 10 tahun keatas, menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2004.....	37
Tabel 3.6. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Prasarananya 2005.....	38
Tabel 3.7. Banyaknya Pondok Pesantren, Murid & Guru 2004.....	39
Tabel 3.8. Banyaknya Ulama, Khotib Dan Mubaligh 2005.....	40
Tabel 4.1. Jenis Kelamin Pemilih PPP Jepara.....	50
Tabel 4.2. Usia Pemilih PPP Jepara.....	50
Tabel 4.3. Agama Pemilih PPP Jepara.....	51
Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan Pemilih PPP Jepara.....	52
Tabel 4.5. Pekerjaan Pemilih PPP Jepara.....	53
Tabel 4.6. Penghasilan Per Bulan Pemilih PPP Jepara.....	54
Tabel 4.7. Keanggotaan Pemilih PPP Jepara dalam Organisasi Massa.....	55
Tabel 4.8. Tingkat Keaktifan Pemilih PPP Jepara dalam Organisasi Massa.....	56

Tabel 4.9. Keterlibatan Pemilih dalam Jabatan Struktural di PPP..... 57

Tabel 4.10. Alasan Memilih PPP..... 57

### **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1. Alur penarikan sampel ..... 10

Bagan 3.1. Struktur Organisasi PPP ..... 47

### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Questioner.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem politik yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat (Budiman,1996:36). Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemilu pada dasarnya merupakan ajang pertemuan dan persetujuan di antara massa rakyat untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen (Juliantara, 1998:99).

Dalam suatu sistem demokrasi, keberadaan partai politik merupakan suatu hal yang niscaya. Partai politik merupakan pengejawentahan aspirasi rakyat. Partai politik muncul sebagai penghubung antara rakyat, di satu sisi, dan negara di sisi yang lain. Ia muncul dengan satu dasar pemikiran; bahwa dengan keberadaan partai politik, maka aspirasi rakyat akan dapat lebih terwadahi dan memiliki aksentuasi yang lebih kuat untuk turut mempengaruhi proses politik.

Konsep pemilihan umum dan partai politik menemukan benang merahnya sebagai dua entitas yang muncul untuk menjamin kedaulatan rakyat yang merupakan ciri sistem politik demokratis. Pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk memilih siapa yang akan mewakilinya untuk memegang kekuasaan, sedangkan partai politik memungkinkan rakyat untuk turut bersaing dalam pemilu dan memperebutkan kekuasaan.

Dalam sejarah Indonesia, pemilu telah dilaksanakan sebanyak sembilan kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan yang paling mutakhir 2004. Selama sembilan kali pelaksanaan pemilu, terjadi suatu dinamika yang mengiringi

setiap pelaksanaan pemilu yang ada. Dinamika itu meliputi baik sistem penyelenggaraan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, siapa saja pihak yang turut berkompetisi dalam pemilu, jumlah peserta pemilu itu sendiri, konstelasi politik sebelum penyelenggaraan pemilu, sampai dengan komposisi pemenang pemilu.

Pemilihan Umum pertama di Indonesia diadakan pada masa orde lama, yakni pada tahun 1955. Hal yang khas pada pemilu 1955 adalah adanya politik aliran. Istilah aliran di Indonesia merujuk pada pengelompokan politik pada tahun 1950-an yang menghasilkan partai-partai politik yang kemudian ikut serta dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955 (Suryakusuma, 1999:39).

Pemilihan umum pertama pada masa orde baru diadakan pada tahun 1971. Partai politik yang ikut serta dalam pemilu terdiri dari PKRI, PSII, NU, Parmusi, Parkindo, PNI, Perti, IPKI dan Golongan Karya. Kemudian pada tahun 1973 parta-partai tersebut melakukan fusi sehingga hanya terbentuk tiga partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar). PDI merupakan gabungan dari PNI, IPKI, Partai Kristen dan Partai Murba. Sedangkan PPP merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. Secara keseluruhan, pemilihan umum telah diadakan sebanyak enam kali pada masa orde baru.

Sejak presiden Soeharto memberikan pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan memberikan jabatannya kepada presiden BJ Habibie pada 23 Mei Mei 1998, maka perpolitikan Indonesia mengalami perubahan drastis. Era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya rezim kekuasaan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, telah membuka peluang berbagai lapisan masyarakat untuk menuntut terlaksananya reformasi di segala bidang. Aksi unjuk rasa mahasiswa Indonesia menuntut reformasi meniupkan

angin yang sejuk dalam kehidupan nasional. Salah satu buah dari reformasi total yang sedang bergulir adalah komunitas politik di Indonesia kembali menghirup udara segar kelahiran partai-partai politik.

Dengan undang-undang yang baru, dalam waktu yang singkat telah berdiri puluhan partai politik. Banyaknya partai politik yang terbentuk tidak terlepas dari kegagalan sistem lama. Dengan paket undang-undang yang muncul politik rezim Orde Baru berusaha menempatkan Golongan Karya sebagai partai hegemonik dan menjadikan partai lain; PPP dan PDI sebagai pelengkap saja. Dalam perkembangannya sistem dan format yang ada terlihat efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi, namun gagal dalam upaya membangun kepolitikan yang demokratis.

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, termasuk tiga partai yang lama yaitu Golongan Karya, PPP dan PDI. Dalam hal ini, PPP dapat dikategorikan sebagai partai politik yang membawa identitas Islam. Oleh karena itu, segmen pasar yang dibidik adalah massa Islam yang mayoritas dari masa Nahdaltul Ulama, Muhammadiyah, PSII dan kaum intelektual Islam kota.

Dalam pada itu, ternyata PPP bukanlah satu-satunya partai politik yang mengusung platform keislaman. Sebagai konsekuensi logis atas hal ini, banyak massa yang berasal dari pendukung lama yang meninggalkan PPP karena sudah ada wadahnya sendiri. Maka wajar jika jumlah perolehan suara PPP pada pemilu 1999 lebih kecil dibandingkan pemilu 1997.

Pemilu 2004 dilakukan sebagai upaya perbaikan atas pemilu 1999. Dari segi sistem pemilu, terjadi suatu perubahan yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya dengan disyahkannya UU 12/2003 tentang pemilu legislatif, dan UU 23/2003 tentang

pemilihan presiden dan wakil presiden. Beberapa perubahan lain dalam pemilu 2004 yakni; dipilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, dipilihnya perorangan untuk duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari segi penyelenggara pemilu, dengan UU baru dibentuk komisi penyelenggara pemilihan umum (KPU) dan sebuah panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) dari golongan non partisan. Sementara itu dari segi peserta, peserta pemilu 2004 meliputi perseorangan untuk DPD, pasangan individu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta partai politik yang berjumlah ada 24 partai politik; separuh dari partai politik peserta pemilu sebelumnya.

Dalam sejarah pemilu, PPP merupakan salah satu partai yang selalu turut menyemarakkan perhelatan akbar tersebut sejak masa orde baru sampai dengan masa reformasi. Dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 1999, maka perolehan suara PPP pada pemilu 2004 semakin menurun. Bahkan, selama lima pemilu terakhir, telah terjadi trend penurunan jumlah perolehan suara PPP, yang hal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus PPP di Kabupaten Jepara berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Perolehan suara PPP**

**Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Tahun Ke Tahun**

<b>NO</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>1987</b>	<b>1992</b>	<b>1997</b>	<b>1999</b>	<b>2004</b>
<b>1</b>	<b>PPP</b>	<b>144.860</b> <b>(36,87%)</b>	<b>188.815</b> <b>(42,22%)</b>	<b>223.087</b> <b>(43,65%)</b>	<b>230.098</b> <b>(40,36%)</b>	<b>177. 694</b> <b>(31,70%)</b>

*Sumber: PPD dan KPUD Jepara (1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004)*

Ini merupakan preseden buruk bagi prospek pemenangan Pemilu PPP pada masa yang akan datang.

Untuk itu, suatu strategi yang jitu perlu diterapkan untuk mempertahankan dan mengangkat posisi PPP dalam perolehan suara Pemilu. Dalam hal ini, salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menentukan strategi yang tepat adalah mengidentifikasi siapa dan bagaimana karakteristik/tipologi masyarakat pemilih PPP di Jepara itu sendiri. Hanya dengan mampu mengidentifikasi siapa para pemilih itulah, perlakuan yang tepat terhadap para calon pemilih itu bisa dilakukan.

## **B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pemetaan tipologi pemilih PPP di Kabupaten Jepara. Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian tersebut, maka dapatlah dirumuskan masalah penelitiannya antara lain sebagai berikut:

1. Seperti apakah karakteristik (tipologi) pemilih PPP di Jepara?
2. Bagaimanakah strategi yang tepat untuk mempertahankan pemilih PPP yang telah ada?
3. Bagaimanakah strategi yang tepat untuk menarik pemilih PPP yang baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan karakteristik (tipologi) pemilih PPP di Jepara.
2. Merumuskan strategi yang tepat untuk mempertahankan pemilih PPP yang telah ada dan menarik pemilih baru.
3. Merumuskan strategi yang tepat untuk menarik pemilih baru.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan antara lain:

- **Manfaat Teoritis:**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan memperkaya khasanah keilmuan mengenai tipologi pemilih PPP di Jepara

- **Manfaat Praktis:**

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi DPC PPP di Jepara tentang tipologi masyarakat pemilihnya, untuk kemudian diketahui strategi yang tepat bagaimana meningkatkan jumlah pemilih PPP di Jepara pada Pemilu yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu didapatkannya suatu gambaran tipologi pemilih PPP di Kabupaten Jepara, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fakta yang diselidiki.

### **E.2. Definisi Konseptual**

Ada beberapa konsep yang hendak didefinisikan dalam penelitian ini antara lain:

- Pemilihan Umum; adalah sebuah prosedur yang mengatur proses pemberian mandat dari rakyat kepada wakil-wakilnya untuk duduk di legislatif maupun eksekutif dalam rangka mengendalikan jalannya roda pemerintahan
- Tipologi; yaitu karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang yang lain.
- Pemilih; warga negara yang menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- Partai Politik; adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok warga negara yang mempunyai tujuan, asas, ideologi yang sejenis yang terorganisir, bertindak sebagai kesatuan politis untuk menggapai kekuasaan dan memilih untuk mengawasi jalannya pemerintahan, serta melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

### **E.3. Definisi Operasional**

Ada delapan indikator yang akan digunakan untuk memetakan tipologi pemilih PPP pada pemilu 2009 mendatang, yaitu:

- 1) Jenis Kelamin
- 2) Usia
- 3) Agama
- 4) Keanggotaan organisasi profesi/organisasi massa
- 5) Tingkat Pendidikan formal/non formal
- 6) Pekerjaan
- 7) Tingkat Penghasilan
- 8) Tingkat Keaktifan di Partai Politik

## **E.4. Populasi dan Sampel**

### **E.4.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Jepara dengan unit analisis individu. Individu yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah laki-laki atau perempuan yang memilih PPP pada pemilihan umum 2004.

### **E.4.2. Sampel**

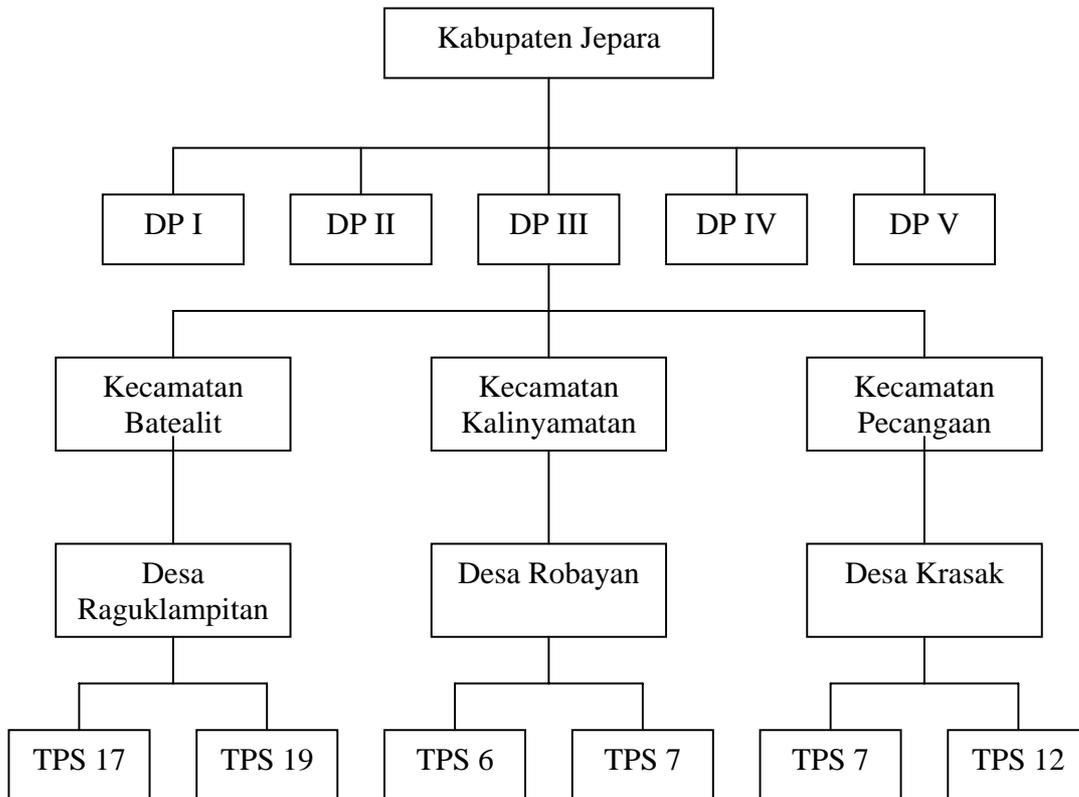
Dari populasi yang ada tidak akan mungkin dilakukan penelitian secara keseluruhan. Maka untuk melakukan kajian diperlukan pengambilan sampel dengan *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) dengan mempertimbangkan prinsip *degree of representativeness* (keterwakilan). Prinsip ini dilakukan dengan melakukan pengelompokan agar populasi bisa dipilah menjadi homogen sehingga mudah diambil sampelnya, untuk dilakukan generalisasi.

Dalam penelitian ini, proses penentuan sampel dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk memilih suatu wilayah yang dianggap mewakili pemilih PPP Jepara, dipilih Daerah Pemilihan (DP) yang berisi pemilih PPP yang paling banyak. Dari data yang ada, dapat diketahui DP III Kabupaten Jepara merupakan DP dengan pemilih PPP terbanyak.
2. Berikutnya, dari DP III didapati bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan di dalamnya, yakni Kecamatan Batealit, Kecamatan Kalinyamatan dan Kecamatan Pecangaan.

3. Dari tiga kecamatan yang ada, didapati bahwa Kecamatan Batealit terdiri dari 11 (sebelas) desa, Kecamatan Kalinyamatan terdiri dari 11 (sebelas) Desa, sedangkan Kecamatan Pecangaan terdiri dari 12 (duabelas) desa.
4. Dari setiap kecamatan, diambil masing-masing 10% dari total desa yang ada sebagai sampel penelitian, sehingga didapati bahwa di tiap kecamatan diambil 1 desa sebagai sampel. Dalam hal ini, sampel desa yang dipilih adalah desa dengan perolehan suara PPP tertinggi.
5. Selanjutnya, dari data yang ada, diketahui bahwa di Kecamatan Batealit, desa yang memperoleh suara PPP terbanyak adalah Desa Raguklampitan. Sedangkan di Kecamatan Kalinyamatan, desa yang memperoleh jumlah pemilih PPP terbanyak adalah Desa Robayan. Sementara itu, di Kecamatan Pecangaan, desa yang memperoleh suara PPP terbesar adalah Desa Krasak.
6. Berikutnya, dari data yang ada diketahui bahwa Desa Raguklampitan terdiri dari 21 TPS, Desa Robayan terdiri dari 16 TPS, dan Desa Krasak terdiri dari 15 TPS.
7. Dari total TPS yang ada di setiap desa, diambil masing-masing 10% sebagai sampel, sehingga didapati 2 (dua) TPS di setiap Desa sebagai sampel. Dalam hal ini, 2 (dua) TPS yang dipilih adalah TPS dengan jumlah pemilih PPP tertinggi.
8. Dari data yang ada, diketahui bahwa 2 (dua) TPS dengan suara tertinggi di Desa Raguklampitan, adalah TPS 17 dan TPS 19. Sementara itu, 2 (dua) TPS dengan suara tertinggi Desa Robayan adalah TPS 6 dan TPS 7. Sedangkan, 2 (dua) TPS dengan suara tertinggi di Desa Krasak adalah TPS 7 dan TPS 12.

Secara sederhana, alur penarikan sampel di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



## F. Teknik Pengumpulan Data

### F.1. Menyebar Questioner

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan memberikan questioner yang berisi daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi unit analisis penelitian, yakni mereka yang menjadi pemilih PPP Jepara pada Pemilu 2004 yang lalu.

### F.2. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang relevan dengan obyek penelitian. Peneliti menggunakan bentuk observasi semi terlibat, yakni peneliti tidak

secara penuh mengambil bagian dari kehidupan subyek yang diteliti. Peneliti hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, pemahaman, kegiatan dan lain-lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian.

### **F.3. Studi Pustaka**

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari data, artikel, arsip, dokumen, peraturan, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku literatur yang dinilai relevan dengan permasalahan penelitian.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

### *G.1. Recording*

Yaitu, proses merekam, mendokumentasikan, dan menyimpan semua data yang diperoleh di lapangan, baik merekam semua kejadian dan fakta yang ada serta mencatat sebagian, ataupun keseluruhan hal-hal yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

### *G.2. Editing*

Yaitu, memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin kemantapan terhadap data tersebut. Memeriksa berarti mengoreksi data, sehingga apabila ada kesalahan pada wawancara segera bisa dicek kembali.

### *G.3. Indexing*

Yaitu, prosedur teknis untuk menata data yang banyak untuk kemudian dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan waktu, subyek maupun topik atau tema yang berhubungan dengan penelitian.

## **H. Analisis Data Kualitatif**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan tujuan untuk meringkas dan menyederhanakan data agar dapat lebih berarti dan mampu diinterpretasikan, sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dan interpretasi data tak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga sudah mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung.

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian diseleksi dan diklasifikasikan menurut fokus penelitian, sehingga mampu menjawab permasalahan. Lebih jauh, analisa yang dikembangkan dalam penelitian ini harus dilakukan berdasarkan pertimbangan logika rasional serta mengandalkan teori atau dalil-dalil yang berlaku umum. Untuk itu, selama melakukan analisis, peneliti juga masih perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori atau menjustifikasi teori baru yang mungkin ditemukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemilu**

Pemilu merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Fungsinya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan (Sanit, 1997:85).

Pemilu pada dasarnya merupakan ajang pertemuan dan persetujuan di antara massa-rakyat untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen (Juliantara, 1998:99). Pada hakekatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara (Donald, 1997:4-5)

Pada dasarnya ada tiga tujuan pemilu diselenggarakan, yaitu :

1. Pemilihan umum sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya.
2. Pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses

politik (Surbakti, 1992:181-182)

Pemilu juga merupakan barometer watak suatu bangsa dalam berpolitik terutama watak pemerintahan dan para kontestan dalam pemilu, tidak hanya sebagai pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Di sejumlah negara yang menerapkan atau setidaknya mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan ber pendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.

Dengan melalui pemilu pula, maka klaim bahwa jajaran elite pemerintah bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui. Memang pemerintah bukan merupakan hasil langsung pikiran rakyat, melainkan hasil bentukan parlemem. Namun anggota parlemen yang dipilih lewat pemilu jelas berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat yang memilihnya.

Keberhasilan pemilihan umum dapat tercapai dengan baik jika diselenggarakan dengan cara-cara yang demokratis dan tidak adanya unsur-unsur kekerasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat agar pemilu dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil. Pada dasarnya pemilu harus pula didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya dukungan dari para tokoh masyarakat dan para ulama.

## **B. Partai Politik**

### **B.1. Partai Politik**

Partai politik merupakan suatu organisasi sosial politik. Sebagai suatu organisasi tentunya memiliki suatu tujuan tertentu. Organisasi dibentuk pada dasarnya karena ingin mengejar tujuan dan sasaran-sasaran tertentu. Tercapainya tujuan-tujuan organisasi tergantung pada baik buruknya penerapan prinsip-prinsip organisasi.

Beberapa prinsip organisasi antara lain :

1. Adanya pembagian kegiatan
2. Wewenang dan tanggung jawab
3. Pelimpahan orang-orang
4. Pelimpahan wewenang
5. Koordinasi
6. Tata hubungan
7. Tujuan (Sukama, 1981: 18)

Apabila prinsip-prinsip organisasi itu diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan.

### **B.2. Pengertian**

Kegiatan orang dalam suatu partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Menurut *Huszar dan Stevenson*, partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan dengan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan (Sukama, 1981: 89).

Sedangkan menurut *J. Carl Friedrich* mendefinisikan partai politik adalah sekumpulan manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan yang resmi bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiardjo, 1993: 200). Sedangkan menurut *R.H. Soltou* mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang -dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Sementara itu *Sigmund Neumann* berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. (Budiardjo,1993: 162)

Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partai politik itu sekelompok manusia yang mengorganisir dirinya dalam bentuk organisasi politik yang didasarkan pada suatu ideologi, dengan maksud untuk memperoleh atau merebut suatu kekuasaan di dalam atau pemerintah. Jadi partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan.

Partai politik itu berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang malahan ingin menciptakan suatu tata

masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik.

Dibandingkan dengan partai politik gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi, organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih sering dipakai adalah kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.

Kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi-instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Jadi kelompok kepentingan itu orientasinya lebih sempit dari pada partai politik.

### **B. 3. Fungsi partai politik**

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain yaitu (Budiardjo, 1993: 163-164) : *Pertama*, partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Di samping itu partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

*Kedua*, partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik. Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrumen of political*

*socialization*). Dalam ilmu politik sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi politik berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik.

*Ketiga*, partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

*Keempat*, Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik maka partai politik seharusnya berusaha untuk mengatasinya.

Menurut **Roy C Macridis** (dalam Ichlasul Amal, 1996 : 17), fungsi-fungsi partai politik antara lain; representasi (perwakilan, konversi dan agregasi), integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), persuasi, represi dan pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.

*Representasi*, merupakan ekspresi dan artikulasi kepentingan di dalam dan melalui partai. Kadang-kadang fungsi perantara (*brokerage*), yaitu partai merupakan

ekspresi kepentingan tertentu, kelas tertentu, kelompok sosial tertentu. Dalam pengertian ini fungsi utama partai adalah memberi sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya, misalnya gereja, petani, buruh, dan sebagainya. Fungsi perantara akan muncul apabila berbagai kepentingan dan pendapat mempunyai alasan yang sama untuk bergabung pada suatu partai. Kemudian partai berusaha mencapai kompromi atas kepentingan dan pendapat yang berbeda-beda itu dan mengajukan pendapat menyeluruh yang dapat diterima semua anggota dan dapat menarik publik secara keseluruhan.

*Konversi dan agregasi* merupakan varian dari representasi dan perantara. Dengan konversi tampak adanya transformasi dari apa yang disebut bahan-bahan mentah politik yaitu kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan keputusan. Sebagaimana organ tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi, maka partai mengubah kepentingan menjadi kebijaksanaan. Jika kita pakai analogi tadi, maka pelaksanaan fungsi-fungsi yang berhasil akan tergantung pada keseimbangan yang tepat antara bahan yang dimasukkan (*intake*), dan yang dikeluarkan (*out put*). Fungsi tersebut mungkin akan terganggu oleh adanya masukan bahan energi yang terlalu banyak.

*Partisipasi, sosialisasi, dan mobilisasi* merupakan beberapa varian dari satu keseluruhan fungsi yang esensial yaitu *integrasi*. Sosialisasi adalah proses, di mana kumpulan norma-norma sistem politik ditransmisikan (ditularkan) kepada orang-orang yang lebih muda; mobilisasi adalah variasi ekstrim dari sosialisasi, yaitu partai berusaha memasukkan secara cepat sejumlah besar orang yang sebelumnya berada di luar sistem tersebut, juga mereka yang apatis terasing, tidak tahu menahu,

tidak tertarik atau takut, ke dalam sistem itu untuk menanamkan kepentingan dan menjamin dukungan massa. Partisipasi berdiri di antara mobilisasi dan sosialisasi –ini berarti bahwa melalui partai di semua sistem, medium ekspresi kepentingan dan partisipasi dalam pemilihan dan kebijaksanaan, terbuka untuk semua pihak. Derajat sosialisasi awal adalah suatu pasca kondisi bagi partisipasi.

Partai, dengan memobilisasi dan menetapkan tingkat partisipasi, *mengintegrasikan* individu ke dalam suatu sistem politik. Partai membentuk ikatan-ikatan rasional dan efektif antara individu dan sistem politik serta mengubah yang pertama (individu) menjadi seorang warga negara dan kedua (sistem politik) menjadi sebuah pemerintahan yang responsif. Cara dalam mana integrasi terjadi merupakan suatu hal penting. Secara hipotetis, seseorang dapat menyatakan bahwa semakin besar tekanannya pada integrasi, maka semakin represif partai politik tersebut, dan semakin besar kecenderungannya menjadi partai tunggal.

*Rekrutmen* digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan latihan (*training*) dan persiapan untuk kepemimpinan: terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif pemerintah atau fungsi-fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja, kompetensi yang baik adalah dalam pemilihan. Sebagian adalah pemimpin dalam masyarakat, kecuali mereka yang dapat mencapai jabatan pemerintahan tanpa masuk dan berpartisipasi secara aktif dalam partai. Angkatan bersenjata, universitas ataupun dunia bisnis, kadang-kadang dapat memunculkan “pemimpin-pemimpin politik”. Naiknya pemimpin karismatik, yang berasal dari Angkatan Bersenjata atau Birokrasi, ke posisi kekuasaan politik sering merupakan indikasi lemahnya atau macetnya sistem kepartaian yang ada.

Yang dimaksud dengan *persuasi* adalah kegiatan partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijaksanaan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Semua media komunikasi bebas digunakan untuk tujuan ini oleh semua partai atas dasar persamaan, dengan jaminan bahwa mereka akan mengajukan pendapat mereka dengan bebas pula. Dengan represi yang dimaksudkan adalah kebalikannya: partai, melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi kepada anggota maupun bukan anggota, mengendaikan nasib semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntuk ketaatan dan membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara yang tidak hanya mengizinkan adanya oposisi tetapi juga mengukum pihak oposisi dan pembangkang. Partai yang berusaha untuk mengintegrasikan dan memobilisasi pada umumnya bersifat represif, tetapi kita harus ingat bahwa ada suatu dialektika konstan yang mungkin mengubah mobilisasi menjadi partisipasi, dan represi menjadi persuasi dan perantara (*brokerage*). Suatu partai totalitarian mungkin bergerak dalam satu arah persuasi dan demokrasi.

Fungsi partai yang lain adalah membuat *pertimbangan, perumusan kebijaksanaan dan kontrol terhadap pemerintahan*. Anggota partai mencapai persetujuan tentang tujuan-tujuan utama partai, dan sebelum itu mereka mempunyai kesempatan untuk memperdebatkan tujuan-tujuan tersebut. Bahkan dalam sistem satu partai, partai juga melakukan hal ini, walaupun Stalin dengan menggunakan berbagai alat represif mampu mendominasi dan memanipulasi proses ini. Juga benar bahwa dalam sistem satu partai, fungsi pertimbangan tetap terbatas pada eselon atas partai dan rakyat diharapkan menerimanya dan bergerak sesuai dengan kebijaksanaan yang

sudah diputuskan dari atas. Dalam sistem dua atau multi partai, secara sistem parlementer atau pemilihan langsung sebagaimana sistem potensial ada kesempatan yang lebih besar untuk diskusi dalam partai dan kompetisi antara pendapat-pendapat yang bertentangan, sehingga proses pertimbangan terbuka untuk semua pihak. Walaupun demikian terdapat suatu bukti, bahwa rakyat awam tidak dapat berbuat banyak dengan kesempatan itu, begitu pula semua partai menurut Michels mempunyai kecenderungan mengarah ke oligarki.

Dengan kontrol terhadap pemerintahan dimaksudkan adanya dua hal. *Pertama* adalah fungsi legislatif dan pemerintahan. Bila partai mempunyai posisi mayoritas dan kontrol legislatif dalam sistem parlementer atau pemilihan langsung sebagaimana sistem presidensial, maka partai mengangkat pemimpinnya baik sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Presiden. *Kedua*, termasuk juga usaha partai untuk mengontrol pemerintahan dan aktivitasnya, baik yang dilakukan setiap hari dalam sistem parlemen maupun melalui kekuasaannya, untuk menolak atau mendukung pengangkatan seorang pemimpin partai politik.

Fungsi terakhir partai politik adalah apa yang disebut dengan fungsi dukungan (*supportive function*). Partai tidak hanya memobilisasi dan memerintah, tetapi juga harus menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup sistem di mana partai tersebut beroperasi. Partai harus menciptakan dukungan pada sistem tersebut. Sosialisasi, mobilisasi, dan partisipasi yang dikelompokkan dalam integrasi mempunyai tujuan ini. Keputusan yang dibuat, kebijaksanaan yang dirumuskan dan dilaksanakan, derajat di mana partai berhasil atau gagal mendengarkan pengikutnya, dapat memperkuat atau melemahkan

dukungan yang diberikan. Tidak ada partai yang dapat mengabaikan tuntutan mendesak untuk waktu yang terlalu lama tanpa adanya usaha menanamkan pola kepercayaan di kalangan rakyat yang bisa mendukungnya dan kelangsungan sistem politik secara keseluruhan.

### **C. Perilaku Politik**

Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena di samping perilaku politik masih ada perilaku lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik. Secara lebih spesifik, perilaku politik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992:131). Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok dan individu dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam suatu negara, misalnya, ada pihak yang memerintah, dan ada pihak lain yang diperintah. Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada yang setuju dan ada yang kurang setuju. Yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan partai politik karena fungsi mereka di bidang politik. Keluarga sebagai suatu kelompok, melakukan berbagai kegiatan termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Dalam hal para anggota suatu keluarga secara bersama memberikan dukungan pada organisasi politik tertentu, memberikan iuran, ikut berkampanye menghadapi pemilu, keluarga yang bersangkutan telah melakukan kegiatan politik, di samping kegiatan yang lain

(Sastroadmodjo, 1995 : 3).

Kajian perilaku politik dapat dilakukan dengan menggunakan tiga unit dasar analisis, yaitu individu sebagai aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud dengan agregasi politik adalah kelompok individu yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik tertentu, kelompok kepentingan, birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan. Tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin, seperti demokratis, otoriter atau *lazies –fair*.

Perilaku politik merupakan produk sosial sehingga untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari berbagai disiplin ilmu lain. Konsep sosiologi, psikologi sosial, antropologi sosial, geopolitik, ekonomi dan konsep sejarah digunakan secara integral. Dengan demikian memahami perilaku politik tidak hanya menggunakan konsep politik saja, tetapi juga menggunakan konsep ilmu lain. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu politik tidak merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan erat dengan disiplin ilmu yang lain.

### **C.1. Perilaku Politik dan Sikap Politik**

Berkaitan dengan perilaku politik, satu hal yang perlu dibahas pula adalah apa yang disebut dengan sikap politik. Meskipun antara sikap dan perilaku terdapat kaitan erat, keduanya dibedakan. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu pernyataan terhadap objek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru merupakan kecenderungan atau pre-disposisi. Dari satu sikap tertentu dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan berkenaan dengan objek yang dimaksud.

Sikap mengandung tiga komponen yaitu kognisi, afeksi dan konasi.

Kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecenderungan bertingkah laku. Ketika kecenderungan bertingkah laku ini benar-benar dinyatakan dalam tindakan, maka lahirlah suatu perilaku. Misalnya, jika ketidaksetujuan terhadap suatu rezim pemerintahan dinyatakan dalam bentuk aksi demonstrasi, maka pada saat itu sikap politik telah berubah menjadi perilaku politik. Jadi, perilaku politik merupakan wujud nyata dari sikap politik.

Berangkat dari pemahaman tentang sikap politik sebagaimana dimaksud diungkapkan di atas, sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap obyek tersebut. Dengan munculnya sikap politik tertentu akan dapat diperkirakan perilaku politik apa yang sekiranya akan muncul. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan pajak pendapatan, misalnya, merupakan sikap politik. Dengan adanya ketidaksetujuan tersebut, perilaku yang diperkirakan akan muncul adalah peninjauan pernyataan keberatan, protes atau unjuk rasa. Walaupun dalam kenyataan bisa saja perilaku itu tidak muncul, akan tetapi sekurang-kurangnya ada kecenderungan untuk itu. Bahwa karena pertimbangan tertentu perilaku politik tersebut tidak dinampakkan oleh orang yang bersangkutan itu soal lain. Yang jelas ketidaksetujuan itu tetap ada sebagai hasil penghayatan terhadap obyek berupa kebijakan menaikkan pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sikap bersifat relatif menetap atau tidak mudah berubah.

## **C.2. Perilaku Politik dan Budaya Politik**

Sebagai manifestasi sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari

budaya politik yang melingkupinya. Budaya politik merupakan sesuatu yang menentukan dan memberi arti tindakan politik. Menurut **Almond** dan **Verba** (dalam Surbakti, 1992:131), budaya politik di sini diartikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Dengan demikian memahami perilaku politik berarti menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan warga negara dalam sistem politik. Orientasi individual ini dapat dibagi menjadi tiga;

*Pertama*, orientasi kognisi, yaitu pengetahuan dan kepercayaan mengenai sistem politik, peranan-peranan dan pemegang peranan-peranan itu, dan input-out put sistem politik. Termasuk ke dalam kognisi itu tidak hanya menyangkut jumlah informasi, tetapi juga ketepatan dan kemampuan untuk mengorganisasi dan memproses informasi itu. Individu mungkin memiliki tingkat pengetahuan dalam akurasi yang tinggi mengenai bagaimana sistem politik bekerja, siapa tokoh-tokoh politik yang berperan dominan, persoalan-persoalan kebijaksanaan yang sedang hangat dibicarakan dan sebagainya.

*Kedua*, orientasi afeksi, yaitu perasaan-perasaan keterikatan, keterlibatan, penolakan, afiliasi, dan sebagainya mengenai sistem politik, peranan-peranan, personel dan penampilan sistem politik. Orientasi ini meliputi intensitas dan kualitas yang berbeda, seperti marah, benci, senang, bangga, dan frustrasi. Individu mungkin mempunyai perasaan alienasi dan penolakan terhadap sistem, barangkali oleh karena keluarga dan sahabatnya mempunyai sikap seperti itu sehingga ia tidak menanggapi sistem politik. Atau juga mungkin karena pengalaman tertentu yang menyenangkan mengakibatkan dia merasa ikut terlibat dalam proses politik sehingga dia memiliki

tanggapan yang wajar terhadap sistem politik.

*Ketiga*, orientasi evaluasi, yaitu penilaian dan pendapat mengenai objek politik yang selalu melibatkan penerapan standard nilai terhadap objek dan kejadian politik (kombinasi standard dan kriteria nilai dengan informasi dan perasaan). Misalnya, seorang individu mengadakan evaluasi atau mengkritik sistem politik sebagai tindak responsif terhadap tuntutan politik anggota masyarakat berdasarkan nilai atau ideologi demokrasi.

Objek-objek orientasi politik dapat pula dibagi menjadi tiga;

*Pertama*, sistem politik secara keseluruhan yang meliputi kognisi sebagai bangsa seperti besar atau kecil, kuat atau lemah, merdeka atau tergantung; afeksi atau perasaan terhadap bangsa, seperti patriotisme dan alienasi; dan evaluasi terhadap bangsa/sistem politik, seperti apakah demokratis, konstitusional, sosialis dan apakah efisien atau tidak.

*Kedua*, komponen-komponen sistem politik seperti struktur-struktur politik, aktor-aktor politik, dan keputusan politik yang secara umum dapat diklasifikasi menjadi: apakah individu terlibat dalam proses politik atau dalam proses input ataukah mereka terlibat dalam proses administrasi atau dalam proses out put. Proses input atau proses politik adalah proses arus tuntutan dari masyarakat ke dalam politik dan transformasi (konversi) tuntutan itu ke dalam keputusan otoritatif (mengikat). Struktur-struktur yang mengambil bagian dalam proses politik ini antara lain kelompok kepentingan, partai politik, media komunikasi, dan pemerintah. Proses administrasi atau out put adalah proses keputusan yang mengikat, dilaksanakan dan ditegakkan. Struktur-struktur yang mengambil bagian dalam proses ini adalah birokrasi

dan pengadilan.

*Ketiga*, diri sendiri (self) sebagai aktor politik yang meliputi substansi dan kualitas norma kewajiban politik pribadi, seperti kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, kecenderungan memelihara harmoni atau konflik; dan meliputi substansi dan kualitas perasaan kemampuan pribadi terhadap sistem politik, seperti apakah ia merasa berhak dan mampu mempengaruhi proses politik, dan apakah ia merasa berhak dan mampu menjadi aktor dalam sistem politik.

Ketiga dimensi atau komponen orientasi itu saling berhubungan dan bahkan mungkin terkombinasi dalam berbagai cara, bahkan dalam individu yang sama yaitu apabila ia mempertimbangkan berbagai aspek di dalam sistem politik. Jenis orientasi yang ada di antara para penduduk mempunyai dampak pada cara dan bekerjanya sistem politik. Pola orientasi umum yang ada di antara penduduk akan membentuk dan menentukan tuntutan responsi terhadap hukum, terhadap dukungan, dan terhadap perilaku individu dalam peranan-peranan politiknya.

Dalam hal ini, secara sederhana, ada tiga tipe budaya politik, yaitu;

*Pertama*, budaya politik parokial (awak), yakni apabila tidak ada orientasi sama sekali terhadap sistem politik sebagai keseluruhan, terhadap input dan output, dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik. Artinya penduduk suatu masyarakat atau bangsa tidak mempunyai orientasi sama sekali terhadap objek politik.

*Kedua*, budaya politik objek (kaula), yakni apabila frekuensi orientasi terhadap sistem politik pada umumnya dan terhadap output sangat tinggi, akan tetapi orientasi terhadap objek input dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik sangat rendah. Artinya, hubungan mereka terhadap output (keputusan) dan sistem sebagai

keseluruhan pada dasarnya bersifat pasif.

*Ketiga*, budaya politik partisipan, yakni pola sikap dan orientasi anggota masyarakat yang cenderung secara eksplisit berorientasi terhadap sistem politik sebagai keseluruhan, terhadap objek dan proses input, terhadap objek dan proses output, dan terhadap diri sendiri sebagai aktivis dalam proses politik.

Dalam hal ini, pada kenyataannya, tidak ada budaya politik yang tunggal dalam masyarakat, namun yang ada adalah budaya politik campuran yang terbagi menjadi tiga tipe, yakni;

*Pertama*, budaya politik awak-kaula, yakni suatu tipe budaya politik yang sebagian besar penduduknya telah menolak eksklusivisme berbagai suku bangsa, desa, dan kekuasaan feodal, serta telah mengembangkan kesetiaan terhadap suatu sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintahan pusat yang jelas.

*Kedua*, budaya politik-kaula partisipan, yakni tipe budaya politik yang sebagian besar penduduknya telah memerlukan orientasi-orientasi input yang terspesialisasi dan suatu perangkat orientasi diri sebagai aktivis, sedangkan sebagian penduduk lainnya tetap berorientasi terhadap struktur pemerintahan otoriter dan mempunyai suatu peringkat orientasi diri sebagai relatif pasif.

*Ketiga*, budaya politik awak-partisipan, yakni tipe budaya politik di mana budaya politik parokial sangat dominan, namun berpadu dengan budaya politik partisipan. Hal ini terjadi karena struktur-struktur norma yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan sehingga memerlukan suatu budaya partisipan. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara tengah berkembang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) perilaku politik seseorang

ditentukan oleh budaya politik tempat dia berada, (2) Budaya politik ditentukan oleh orientasi politik individu-individu yang ada di dalamnya yang meliputi orientasi kognisi, orientasi afeksi, dan orientasi evaluasi, (3) Orientasi politik individu dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; tingkat pendidikannya, keluarganya, agama/ideologinya, kelompok/organisasi yang diikutinya, pekerjaannya, tingkat ekonominya, faktor masa lalu/pengalaman hidupnya, usianya, ancaman pihak lain, atau bisa juga karena faktor alam seperti cuaca, keadaan geografis dan sebagainya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Keadaan Geografis**

##### a. Letak dan Pembagian Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Jepara terletak di antara 3°23'20" bujur timur dan 4°9'35" lintang selatan, berbatasan dengan : 3°23'20"-35 bujur timur dan 5°43'30"-44" lintang selatan, berbatasan dengan :

Sebelah Barat : Laut Jawa

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Wilayah Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah 1004,132 km<sup>2</sup> dengan topografi yang bervariasi. Hal ini meliputi dataran tinggi (di sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering), dataran rendah dan daerah pantai yang meliputi Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Keling. Ketinggian tanah dari permukaan laut sangat bervariasi antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Dataran tertinggi mencapai 1301 m dan terendah 0 m. Bagian terendah berada di sepanjang pantai dan bagian tertinggi terdapat di Kecamatan Keling (kaki Gunung Muria). Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jepara berupa dataran rendah.

Tabel III.1  
Banyaknya Desa/Kelurahan, RW, RT  
Dan Kepala Keluarga (KK)

Kecamatan	Desa/Kelurahan	RW	RT	KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kedung	18	63	250	18.299
2. Pecangaan	12	58	334	17.944
3. Kalinyamatan	12	50	236	15.601
4. Welahan	15	44	217	18.208
5. Mayong	18	75	386	19.572
6. Nalumsari	15	78	365	16.374
7. Batealit	11	51	282	16.432
8. Tahunan	15	74	315	23.216
9. Jepara	16	81	292	16.511
10. Mlonggo	16	89	509	32.513
11. Bangsri	12	120	436	22.908
12. Kembang	11	77	323	18.501
13. Keling	20	116	557	30.915
14. Karimunjawa	3	14	52	2.467
Jumlah Tahun 2004	194	990	4554	269.461

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2005*

## **B. Keadaan Demografi**

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, karena merupakan salah satu modal dasar dari pembangunan nasional. Jumlah penduduk di Kabupaten Jepara selama tahun 2005 adalah 1.078.037 jiwa yang terdiri dari laki-laki 542.510 jiwa dan perempuan 535.527 jiwa. Keadaan umum wilayah Kabupaten Jepara berdasarkan penyebaran penduduknya akan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.2  
Kepadatan Penduduk Per Km

Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Luas Daerah (km)	Jumlah Penduduk	Kepdatan Penduduk Per Km
1. Kedung	18	43,063	70.112	1.628
2. Pecangaan	12	35,398	75.014	2.119
3. Kalinyamatan	12	24,180	56.292	2.328
4. Welahan	15	27,642	71.064	2.571
5. Mayong	18	65,043	81.016	1.246
6. Nalumsari	15	56,965	69.258	1.216
7. Batealit	11	88,879	74.656	840
8. Tahunan	15	38,906	95.400	2.452
9. Jepara	16	24,667	75.265	3.051
10. Mlonggo	16	102,955	127.951	1.243
11. Bangsri	12	85,360	93.007	1.090
12. Kembang	11	108,116	64.664	598
13. Keling	20	231,758	115.752	499
14. Karimunjawa	3	71,200	8.586	121
Tahun 2004		1.004,132	1.078.037	1.074

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2005*

Penduduk Kabupaten Jepara mempunyai tingkat intensitas yang tinggi terhadap pemilihan umum, karena sebagian besar penduduknya berada pada usia 17 tahun ke atas. Hal ini menimbulkan tingkat intensitas yang tinggi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan Pemilu secara tepat dan benar. Untuk lebih jelasnya perincian penduduk Kabupaten Jepara baik menurut umur maupun jenis kelamin terlihat pada Tabel III.3 berikut ini :

Tabel III.3  
Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2005

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	52.744	49.752	102.496
2	5-9	54.348	50.789	105.137
3	10-14	55.318	51.747	107.065
4	15-19	58.008	56.305	114.313
5	20-24	50.013	51.785	101.798
6	25-29	48.838	49.675	98.513
7	30-34	42.809	42.635	85.444
8	35-39	40.617	41.259	81.876
9	40-44	34.606	32.337	66.943
10	45-49	27.546	25.008	52.554
11	50-54	21.396	21.477	42.873
12	55-59	17.050	17.345	34.395
13	60-64	16.175	17.746	33.921
14	65-69	10.129	12.282	22.411
15	70-74	7.574	8.743	16.317
16	75 +	5.339	6.642	11.981
	Jumlah	542.510	535.527	1.078.037

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2005*

Dari tabel III.3 diatas, dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk usia produktif yaitu kelompok umur 15-59 tahun berjumlah 678.709 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 60 tahun keatas berjumlah 399.328 jiwa.

Selain itu dari tabel III.3 diketahui bahwa jumlah penduduk untuk kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 114.313 jiwa penduduk atau 11% merupakan pemilih pemula dalam pemilihan umum mendatang. Dilihat dari jumlah penduduk menurut

usia, maka jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang berhak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum mendatang adalah 678.709 atau 72%. Dengan demikian kita mengetahui bahwa 72% penduduk dihadapkan pada keharusan untuk melaksanakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan Kabupaten Jepara merupakan daerah yang cukup potensial untuk dijadikan pendukung PPP.

### C. Keadaan Sosial Ekonomi

Wilayah Kabupaten Jepara sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang industri. Untuk mengetahui persebaran penduduk menurut mata pencaharian bagi umur 10 tahun keatas dapat dilihat dari tabel III.4 sebagai berikut :

Tabel III.4  
Penduduk Kabupaten Jepara 10 tahun keatas  
Yang bekerja menurut lapangan usaha utama

No	Lapangan Usaha Utama	Jumlah
1	Pertanian	85.784
2	Pertambangan	1.616
3	Industri	230.748
4	Listrik, gas dan air	680
5	Konstruksi	17.624
6	Perdagangan	96.684
7	Komunikasi	14.092
8	Keuangan	1.424
9	Jasa	39.832
10	Lainnya	340
	Jumlah	488.824

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Jepara 2005*

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja dengan prosentase sebesar 20% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Dominannya sektor ini merupakan suatu hal yang wajar, mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang sangat terkenal dengan kerajinan ukirnya. Sektor lain yang cukup potensial dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian dan perdagangan. Sedangkan sektor-sektor yang lain hanya berfungsi sebagai penunjang.

#### **D. Keadaan Sosial dan Budaya**

##### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam rangka meningkatkan pembangunan di segala bidang. Pendidikan sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Untuk mengetahui persebaran penduduk dari tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.5

Penduduk Kabupaten Jepara yang berumur 10 tahun keatas, menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2004

No	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Tidak/belum pernah sekolah	89.224
2	Tidak/belum tamat SD/MI	175.388
3	SD/MI	278.376
4	SLTP	181.568
5	SMU	92.904
6	SMK	17.152
7	DI/II	7.780
8	DIII/SARMUD	3.188
9	DIV/ S1/ S2/ S3	9.968
	Jumlah	855.548

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Jepara Tahun 2005

Dari tabel III.5 di atas, dapat dikemukakan penduduk yang paling besar jumlahnya berdasarkan tingkat pendidikan adalah lulusan/tamat SD/MI yaitu 278.376 orang. Selain itu terdapat 264.612 penduduk yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD/MI. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, karena tingkat pendidikan penduduk seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.

b. Agama

Di wilayah Kabupaten Jepara terdapat lima macam agama yang dianut oleh Warga masyarakat, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, dan Hindu. Namun, mayoritas masyarakat di Kabupaten Jepara adalah pemeluk agama Islam. Keadaan ini dapat dilihat dari data dalam tabel-tabel berikut :

Tabel III.6

## Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Prasarananya 2005

Kecamatan	Masjid	Langgar	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Wihara Budha
1. Kedung	30	232	2	-	-	-
2. Pecangan	42	220	10	2	1	-
3. Kalinyamatan	42	141	7	1	-	-
4. Welahan	29	152	5	3	-	-
5. Mayong	59	194	14	2	1	-
6. Nalumsari	54	170	12	-	-	-
7. Batealit	62	304	5	1	-	1
8. Tahunan	52	236	10	1	-	-
9. Jepara	54	111	20	9	1	4
10. Mlongo	103	406	4	10	-	4
11. Bangsri	101	455	4	12	-	1
12. Kembang	100	-	-	10	-	-
13. Keling	176	336	6	34	-	14
14. Karimunjawa	12	32	-	1	-	-
	916	2.989	99	86	3	24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Jepara Tahun 2005

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jepara merupakan pemeluk agam Islam dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yang ada. Tabel III.6 memperlihatkan bahwa tempat ibadah umat Islam merupakan yang terbanyak jumlahnya. Pada tabel terlihat jumlah mesjid sebanyak 916 bangunan, langgar sebanyak 2.989 bangunan dan musholla sebanyak 99 bangunan. Sementara itu, jumlah tempat ibadah pemeluk agama lainnya bahkan tidak mencapai setengah jumlah tempat ibadah umat Islam yang ada di sana.

Data tentang banyaknya jumlah mesjid, musolla dan langgar yang ada di Jepara seperti tampak pada tabel di atas, adalah fakta yang menunjukkan banyaknya

pemeluk agama Islam di Jepara. Artinya mayoritas penduduk Kabupaten Jepara adalah pemeluk agama Islam.

Selain itu, umat Islam di Kabupaten Jepara meyakini pentingnya pendidikan generasi muda secara Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya pondok pesantren yang berdiri dan jumlah murid yang menjalani pendidikan di sana, serta guru-guru yang mengajar pada masing-masing pondok pesantren tersebut. Hal ini seperti terlihat pada tabel III.7 berikut ini :

Tabel III.7  
Banyaknya Pondok Pesantren, Murid & Guru 2004

Kecamatan	Ponpes	Banyaknya Murid			Banyaknya Guru		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1. Kedung	32	2.921	2.913	5.834	304	201	505
2. Pecangaan	9	1.002	1.173	2.175	154	34	188
3. Kalinyamatan	13	1.171	817	1.988	114	31	145
4. Welahan	11	809	785	1.594	68	32	100
5. Mayong	14	1.323	1.448	2.771	117	70	187
6. Nalumsari	5	490	410	900	958	17	975
7. Batealit	8	1.033	484	1.517	111	29	140
8. Tahunan	30	3.561	1.838	5.399	349	77	426
9. Jepara	6	831	80	911	111	7	118
10. Mlongo	19	1.350	1.185	2.535	128	68	196
11. Bangsri	13	696	812	1.508	85	37	122
12. Kembang	3	154	71	225	11	2	13
13. Keling	12	431	776	1.207	61	50	111
14. Karimunjawa	-	-	-	-	-	-	-
	174	15.772	12.792	28.564	2.571	655	3.226

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Jepara Tahun 2005*

Dari tabel III.7 di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Jepara ada 174 buah pondok pesantren, dengan 28.564 orang murid yang terdiri dari 15.772 orang murid laki-laki dan 12.792 orang murid perempuan. Selain itu ada sebanyak 3.226 orang tenaga pengajar di mana sejumlah 2.571 orang adalah guru laki-laki dan 655 orang guru wanita. Data tersebut menunjukkan keyakinan akan pentingnya pendidikan Islam bagi para orang tua dengan memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren yang ada.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengajaran secara Islam sejalan dengan banyaknya tempat pendidikan seperti pondok pesantren yang pada umumnya dipimpin oleh seorang ulama. Maka tidak mengherankan jika jumlah ulama di Kabupaten Jepara juga sangat banyak, seperti tampak pada tabel III.8 di bawah ini :

Tabel III.8  
Banyaknya Ulama, Khotib Dan Mubaligh 2005

Kecamatan	Ulama	Khotib	Mubaligh
1. Kedung	175	163	50
2. Pecangaan	75	164	56
3. Kalinyamatan	85	164	61
4. Welahan	175	160	30
5. Mayong	100	134	63
6. Nalumsari	165	168	70
7. Batealit	170	150	69
8. Tahunan	75	115	59
9. Jepara	105	175	99
10. Mlongo	195	212	78
11. Bangsri	150	180	89
12. Kembang	165	180	89
13. Keling	188	202	92
14. Karimunjawa	20	30	16
	1.843	2.197	921

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Jepara Tahun 2005*

## **E. Sejarah PPP di Jepara**

### **B.1. Sejarah PPP di Jepara**

Pemfusiaan partai-partai politik yang dilakukan oleh Orde Baru Soeharto, menjadikan kesepuluh partai politik di Indonesia pada pemilu 1971, meleburkan diri mereka ke partai PPP atau PDI. Sebuah pilihan kebijakan yang dipaksakan oleh orde baru ini, mempunyai implikasi atas format ulang partai politik dan perang kepentingan yang semakin beragam dari partai politik itu sendiri. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat pusat semata, tetapi pada daerah pun, hal tersebut tetap menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang, dan membutuhkan energi untuk saling memahami dan saling bertoleransi terhadap semua kepentingan yang dibawa oleh setiap partai politik anggota fusi. Demikian halnya, tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh partai Islam di daerah Jepara. Karena, dari partai pusat mereka telah melakukan konsolidasi dengan pemfusiaan partai politik, maka para pengurus dan anggota partai Islam di daerah Jepara pun, juga melakukan pemfusiaan partai di tingkat daerah.

Pemfusiaan partai di daerah Jepara dilakukan oleh H. Muhammadi, BSc, yang pada waktu itu merupakan tokoh NU yang paling disegani di daerah Jepara. Selain H. Muhammadi, masih ada tokoh yang ikut mendirikan PPP Kabupaten Jepara, diantaranya; H. Muhammad Khadlir (Tokoh Parmusi ) dan Pak Alwi (Tokoh Muhammadiyah). Karena Kabupaten Jepara didominasi oleh penganut NU, maka jabatan Ketua PPP, didominasi oleh orang-orang NU, salah satunya waktu itu adalah H. Muhammadi sendiri. Sedangkan, untuk dua tokoh yang lainnya, dari Parmusi dan Muhammadiyah, masing-masing menempati jabatan di Wakil Ketua PPP.

Jabatan ketua PPP, yang ditempati oleh H. Muhammadi hanya bertahan sampai tahun 1984, karena ada pertentangan pada tubuh NU sendiri. Pertentangan yang dihasilkan sejak adanya Khittah NU Situbondo, yang menempatkan NU sebagai Organisasi Massa, maka H. Muhammadi memilih meninggalkan posisi Ketua PPP dan lebih berniat untuk menjabat sebagai Ketua NU di Kabupaten Jepara. Pilihan sebagai Ketua NU lebih didasarkan atas pertimbangan, kurangnya kader NU yang berminat untuk mengurus Organisasi Massa NU. Setelah jabatan ketua PPP tidak dipegang oleh H. Muhammadi, keadaan partai politik dan perkembangannya pun tidak pernah diikuti lagi oleh Muhammadi. Walaupun dia menjabat sebagai Ketua NU dan sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara selama 4 periode (1977-1997), tetapi kiprahnya dalam PPP tidak pernah ada lagi, sehingga hal tersebut menjadikan dia tidak tahu menahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh PPP. Akumulasi dari semua itu, menurut klaim sepihak yang dilakukan oleh Muhammadi, bahwa PPP yang sekarang dengan PPP yang dipimpinnya dulu, tidak sama dan semakin jauh dari garis perjuangan PPP yang dideklarasikan oleh kelima tokoh nasional pada tahun 1973.

Pada jamannya, PPP merupakan wadah aspirasi, yang dikhususkan untuk umat Islam, baik pada level perpolitikan nasional maupun pada tingkatan daerah-daerah. Sebuah wadah yang diperuntukkan bagi pemersatu kepentingan politik umat Islam, telah dilupakan oleh PPP sendiri. Hubungan yang erat antara kiai dan para politisi di PPP, pada saat sekarang ini, hampir tidak pernah ditemukan. Hubungan yang bersifat *simbiosis mutualisme*, yang menempatkan kiai sebagai guru moral, rohani dan garis landasan perjuangan PPP, semuanya telah luntur pada saat sekarang. Kebanyakan politisi berjalan sendiri sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dan di satu sisi, kiai pun sebenarnya masih

ingin berkecimpung dalam dunia politik pada kapasitasnya, tetapi faktor ketidakpahaman masalah politik menjadikan sebagian kyai tidak pernah masuk dalam wilayah politik. Sebab yang paling berpengaruh, adalah tingkat pengetahuan kiai-kiai sekarang yang rendah pada masalah-masalah politik. Kalau kiai mempunyai pengetahuan politik yang tinggi, maka semua masalah dan duduk perkara yang ada di PPP itu, tidak akan pernah terjadi. Peran kiai menempati aktivitas yang paling penting dari PPP, karena semua hal yang berhubungan dengan dunia politik, memiliki nilai yang sangat urgens manakala mendapatkan restu dari kyai. Status sosial yang tinggi dan tingkatan stratifikasi sosial yang tinggi, menjadikan suara kyai lebih didengar oleh masyarakat, dan dalam dunia politik pun, kyai layak untuk mendapatkan tempat tertinggi dalam partai politik, mengingat kiprah dan perannya tidak hanya sebagai pendakwah penceramah, tetapi sekaligus pembenah moral dari politisi yang ada di PPP.

*Sekretaris Drs. Abr. Rosyid Generasi berikutnya Muhlas`Anwar`sedang Sek. H.Nor Ahmad Tas.an BSc, Ke udia H.Masykuri Rosid dan Sholeh Taufiq sampai 3 X jabatan 1987 – 1982, ( 1973- 1977, 1977- 1982, H.Muhamadi, 1982 – 1987-Muhlas, 1987 -1992 Muhlas. Sedang Maskuri1992- 1997, 1997- 2002, 2002 – 2005 .*

## **B.2. Bagan Struktur Organisasi PPP dan Fungsi-fungsinya**

Secara organisatoris, struktur kepartaian PPP ditempati oleh Pimpinan Harian, baik dari pusat sampai daerah. Secara berurutan, dan terstruktur mulai dari atas, Pimpinan Harian terbagi menjadi Pimpinan Harian Pusat (negara), Pimpinan Harian Wilayah (provinsi), Pimpinan Harian Cabang (kabupaten/kota), Pimpinan Anak Cabang (kecamatan), dan Pimpinan Ranting (desa). Pimpinan Harian PPP, mempunyai kewenangan, antara lain:

- a. Menentukan kebijakan umum PPP sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Muktamar, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, dan ketentuan-ketentuan lainnya;
- b. Menetapkan personalia anggota Majelis Syari'ah, anggota Majelis Pertimbangan Pusat, dan anggota Majelis Pakar Pusat dengan memperhatikan sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- c. Membentuk dan mengoordinasikan Departemen-departemen, Lembaga-lembaga, dan Badan Otonom;
- d. Mengambil Keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga diluar PPP di tingkat Pusat;
- e. Mengesahkan susunan dan personalia Pimpinan Harian Wilayah, Cabang, dan Pimpinan Majelis di Wilayah serta Cabang yang bersangkutan, sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Wilayah/Cabang;
- f. Menetapkan susunan dan personalia Pimpinan Fraksi PPP di MPR/DPR RI dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi;
- g. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di MPR/DPR RI dan Pimpinan Harian Wilayah dan Cabang;
- h. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di MPR/DPR RI. Musyawarah Wilayah/cabang, Pimpinan Harian Wilayah dan Cabang, yang bertentangan dengan AD/ART, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari majelis Syari'ah atau Majelis Pertimbangan Pusat sesuai dengan sifat keputusannya;

- i. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah/Cabang Luar Biasa dalam hal Pimpinan harian Pusat menilai, bahwa telah terjadi kemacetan/kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pimpinan Harian Wilayah/Cabang; dan
- j. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh AD/ART.

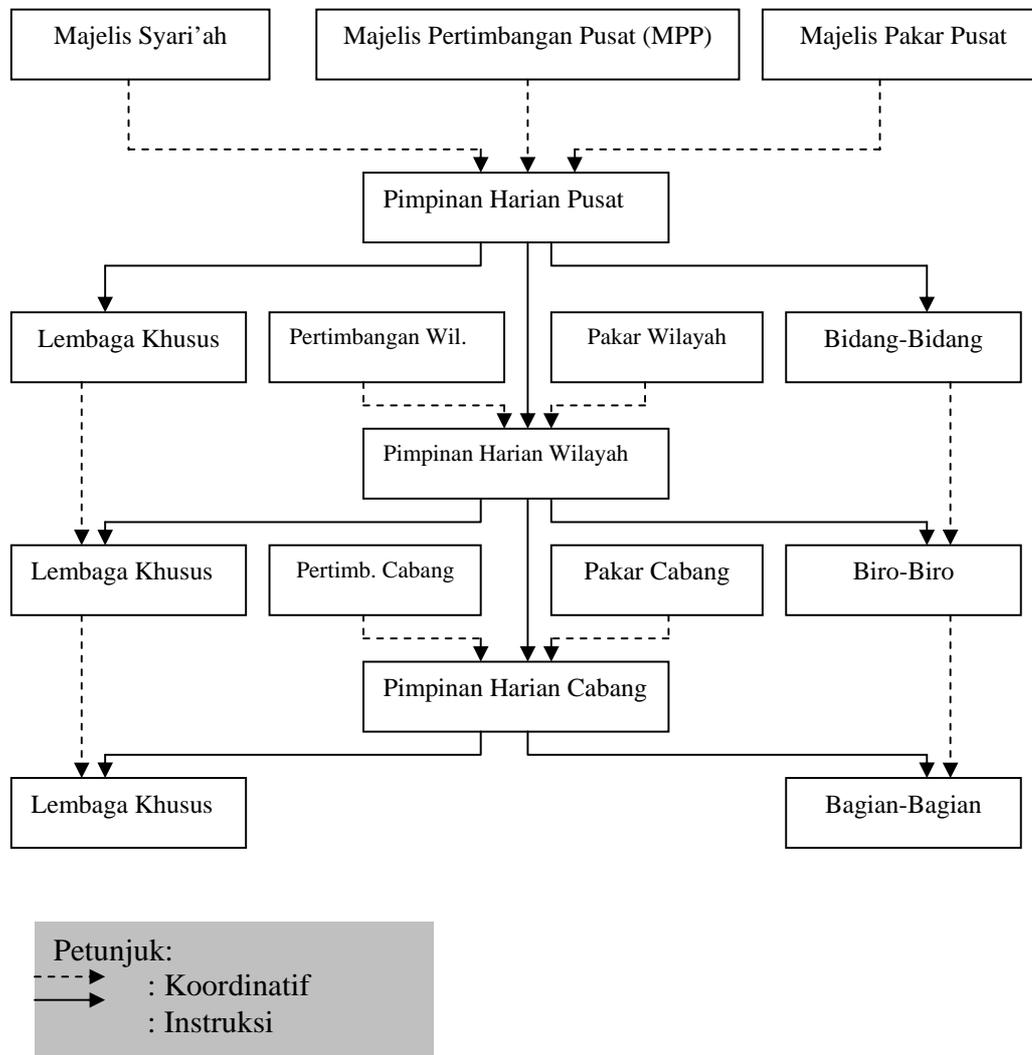
Secara garis besar, kewenangan antara Pimpinan Harian Pusat sampai Pimpinan Ranting tidak terlalu berbeda jauh. Perbedaan kewenangannya, hanya didasarkan semakin berkurangnya setiap tingkatan yang turun. Misalnya, kewenangan Pimpinan Harian Wilayah, dan Cabang, hanya bertugas melaksanakan kebijakan PPP yang berkaitan langsung dengan kapasitasnya di daerah tersebut, serta mengkoordinasikan keputusan PPP kepada Pimpinan Harian di bawahnya. Pimpinan Harian Wilayah berwenang melaksanakan kebijakan partai dan sekaligus mengkoordinasikan kebijakan PPP kepada Pimpinan Harian Cabang, dan seterusnya.

Pimpinan Harian Pusat, merupakan struktur yang paling tinggi dalam organisasi kepartaian PPP. Ketua Umum dari Pimpinan Harian Pusat, menempati posisi teratas dari struktur organisasian PPP. Semua aktivitas yang berkenaan dengan PPP, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pimpinan Harian Pusat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pimpinan Harian Pusat terdiri dari kepengurusan satu Ketua Umum, beberapa Ketua, dan seorang Sekretaris Umum, seorang Wakil Sekretaris Umum, beberapa Sekretaris, seorang Bendahara, dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara. Aturan Anggaran Dasar PPP, mensyaratkan Pimpinan Harian Pusat tidak boleh melebihi 37 orang. Secara terstruktur pula, hal itu juga berlaku pada tingkat wilayah, cabang, sampai Ranting. Batasan kepengurusan untuk Wilayah, adalah 23 orang, Cabang mensyaratkan

tidak kurang dari 21 orang, Anak Cabang tidak boleh melebihi 17 orang, dan Ranting sekurang-kurangnya 13 orang.

Dalam menjalankan kewenangannya, selain didukung dengan personel kepengurusan di organisasi, Pimpinan Harian Pusat juga dibantu oleh Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Majelis Pakar Pusat. Kedudukan ketiga Majelis, tidak tegas dalam aturan Anggaran Dasar PPP, hubungan ketiga Majelis itu dengan Pimpinan Harian Pusat, tidak diatur secara rinci, hanya disebutkan dalam Anggaran Dasar, bahwa "*harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pimpinan Harian Pusat*". Berdasarkan kata-kata itulah, penulis melihat bahwa kedudukan ketiga Majelis itu, berada diatas Pimpinan Harian Pusat. Ketiga Majelis itu, mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Majelis Syari'ah terdiri dari para ulama yang bekerja secara kolektif, dan mempunyai kewenangan memberikan fatwa agama dan berkedudukan pada level pusat saja. Sedangkan Majelis Pertimbangan Pusat yang terdiri dari para tokoh partai yang bekerja secara kolektif, berwenang dalam hal pemberian pertimbangan, nasehat, dan saran yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pimpinan Harian Pusat. Majelis Pertimbangan, adalah sebuah majelis yang berada baik di tingkat pusat sampai tingkat Ranting (level desa). Dan terakhir, adalah Majelis Pakar Pusat, yang terdiri dari para cendekiawan yang bekerja kolektif, dan bertugas melakukan pengkajian masalah negara, bangsa, dan masyarakat, sebagai masukan PPP. Hasil kajian dari Majelis Pakar Pusat ini, harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pimpinan Harian Pusat. Majelis Pakar ini pun, dapat ditemui juga pada level Wilayah (provinsi) dan Cabang (kabupaten/kota). Setelah level Cabang, Majelis Pakar tidak ada dalam struktur kepartaian. Secara lebih lengkap, hal itu dapat ditunjukkan dalam struktur berikut;

### Bagan III.1 Struktur Organisasi PPP



Sumber : diolah dari AD/ART PPP 2005

Penempatan kyai dalam struktur PPP, menempati status politik yang tertinggi dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kyai dalam struktur organisasi PPP, bertugas untuk memberikan fatwa agama kepada Pimpinan Harian Pusat. Perbedaan antara kyai yang ada di pusat dengan yang ada di daerah, hanya permasalahan nama dan lembaga yang menaunginya. Kalau di tingkat pusat, kyai yang tergolong ulama dimasukkan ke

dalam Majelis Syari'ah, tetapi pada level provinsi (wilayah) sampai ranting (desa), masuk dalam kepengurusan partai dan menjadi anggota Majelis Pertimbangannya.

## BAB IV

### TIPOLOGI PEMILIH PPP JEPARA

Pada Bab IV ini akan diuraikan bagaimana hasil temuan penelitian di lapangan yang tampak dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Temuan penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan melakukan semacam generalisasi sehingga akan dapat diketahui bagaimana tipologi pemilih PPP di Kabupaten Jepara.

#### A. Temuan Penelitian

##### A.1. Jenis Kelamin Responden

Responden penelitian ini berjumlah 180 orang yang berada di Daerah Pemilihan (DP) III Pemilu 2004. DP III ini terdiri dari tiga Kecamatan, Kabupaten Jepara, yakni Kecamatan Batealit, Kecamatan Kalinyamatan dan Kecamatan Pecangaan. (Uraian lebih terperinci mengenai hal ini, ada di Bab Metodologi Penelitian).

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui jenis kelamin pemilih PPP seperti tampak pada tabel IV.1 berikut ini :

**Tabel IV.1**  
**Jenis Kelamin Pemilih PPP Jepara**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pria	88	48%
2	Wanita	91	52%
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi pemilih PPP yang berjenis kelamin pria dan wanita relatif seimbang, yakni 52% merupakan pemilih wanita dan 48% merupakan pemilih pria.

### **A.2. Usia Responden**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui usia pemilih PPP seperti tampak pada tabel IV.2 berikut ini :

**Tabel IV.2**  
**Usia Pemilih PPP Jepara**

No	Usia	Frekuensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17-20 tahun	7	3,89 %
2	21-25 tahun	9	5 %
3	26-30 tahun	17	9,44 %
4	31-40 tahun	34	18,89 %
5	41-45 tahun	44	24,44 %
6	45-50 tahun	29	16,12 %
7	>50 tahun	40	22,22 %
Total		180	100 %

*Sumber : Quesioner.*

Komposisi pemilih PPP dari segi usia ternyata sangat beragam. Responden dengan berbagai usia memutuskan untuk memilih PPP. Tabel IV.2 menunjukkan hal ini. Namun ternyata responden yang berusia 41-45 tahunlah yang paling banyak, yaitu sebanyak 24,44%. Berikutnya adalah usia lebih dari 50 tahun, yaitu sebanyak 22,22%, dan usia 31-40 tahun, sebanyak 18,89%. Sementara itu, responden yang

berusia 45-50 tahun berjumlah 16,12%, usia 26-30 tahun 9,44%, usia 20-25 tahun sebanyak 5%, dan yang paling sedikit adalah usia 17-20 tahun sebanyak 3,89%.

### **A.3. Agama Responden**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui agama pemilih PPP seperti tampak pada tabel IV.3 berikut ini :

**Tabel IV.3**  
**Agama Pemilih PPP Jepara**

No	Agama	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Islam	180	100%
2	Non Islam	-	-
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Tabel IV.3 memperlihatkan data bahwa seluruh responden yang memilih PPP dalam Pemilu 2004 adalah mereka yang beragama Islam.

### **A.4. Tingkat Pendidikan Responden**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui tingkat pendidikan pemilih PPP seperti tampak pada tabel IV.4 berikut ini :

**Tabel IV.4**

**Tingkat Pendidikan Pemilih PPP Jepara**

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD / MI (termasuk tidak tamat SD)	108	60 %
2	SMP/MTs (termasuk tidak tamat SMP)	48	26,67 %
3	SMA / MA (termasuk tidak tamat SMA)	24	13,33 %
4	Sarjana (S1, S2, S3)	-	0%
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Data dalam tabel IV.4 memperlihatkan tingkat pendidikan responden yang merupakan pemilih PPP di Jepara. Data tersebut menunjukkan mayoritas pemilih adalah mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam penelitian di lapangan tidak ditemukan responden dengan tingkat pendidikan sarjana. Data yang diperoleh menunjukkan, 60% adalah responden dengan tingkat pendidikan SD atau sederajat dan bahkan ada yang tidak sampai menamatkan tingkat sekolah dasar. Sementara itu 26,67% adalah responden dengan tingkat pendidikan SMP atau sederajat, yaitu sebanyak 26,67%, dan sisanya merupakan responden dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu SMA atau sederajat sebanyak 13,33%.

#### **A.5. Pekerjaan Responden**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui pekerjaan pemilih PPP seperti tampak pada tabel IV.5 berikut ini :

**Tabel IV.5**  
**Pekerjaan Responden**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PNS	1	0,55 %
2	Pedagang	48	26,67 %
3	Petani	79	43,89 %
4	Pengusaha	5	2,78 %
5	Penjahit	5	2,78 %
6	Pelajar	5	2,78 %
7	Ibu Rumah Tangga	33	18,33 %
8	Tukang Batu	1	0,55%
9	Tukang Kayu	3	1,67 %
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Data dalam tabel IV.5 di atas menunjukkan beragamnya pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan responden. Namun, dari semuanya itu yang terbanyak adalah responden yang berprofesi sebagai petani, yaitu sebanyak 43,89%. Berikutnya adalah pedagang, yaitu sebanyak 26,67%, dan ibu rumah tangga sebanyak 18,33%. Sementara itu sisanya hanya sebagian kecil saja, yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 0,55%, pengusaha dan penjahit masing-masing 2,78%, tukang batu 0,55%, tukang kayu 1,67% dan pelajar sebanyak 2,78% dari keseluruhan responden.

#### **A.6. Penghasilan Per Bulan Responden**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui penghasilan per bulan pemilih PPP seperti tampak pada tabel IV.6 berikut ini :

**Tabel IV.6**  
**Penghasilan Per Bulan**

No	Penghasilan per bulan	Frekuensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	< Rp. 1.000.000,-	150	83,33%
2	Rp. 1.000.001 – Rp.2.000.000,-	26	14,44%
3	Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000,-	1	0,56%
4	> Rp. 3.000.001,-	3	1,67%
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Penghasilan pemilih PPP di Jepara pada umumnya adalah kurang dari Rp.1.000.000,-. Ini terlihat pada tabel IV.6. Data dalam tabel menunjukkan bahwa sebanyak 83,33% responden mempunyai pendapatan per bulan kurang dari satu juta rupiah. Dalam penelitian di lapangan diketahui bahwa mereka dengan penghasilan tersebut pada umumnya berprofesi sebagai petani. Hanya 14,44% warga yang berpenghasilan di atas Rp.1.000.000,-. Sementara itu, 0,56% berpenghasilan antara Rp.2.000.001,- sampai Rp.3.000.000,-, dan hanya 1,67% memiliki penghasilan di atas Rp.3.000.000,-.

#### **A.7. Keanggotaan Responden dalam Organisasi Massa**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui keanggotaan pemilih PPP dalam organisasi massa seperti tampak pada tabel IV.7 berikut ini :

**Tabel IV.7**

**Pemilih yang termasuk anggota/pengikut organisasi/kumpulan pengajian/jam'iyah tertentu**

No	Anggota/Pengikut Ormas Tertentu	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ya	162	90%
2	Tidak	18	10%
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Warga Kabupaten Jepara pemilih PPP ternyata banyak yang merupakan anggota organisasi atau suatu perkumpulan tertentu. Data dalam tabel IV.7 memperlihatkan hal ini. Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa mereka adalah anggota dari minimal satu organisasi tertentu, dan hanya 10% saja yang bukan merupakan anggota organisasi tertentu.

**A.8. Tingkat Keaktifan Responden dalam Organisasi Massa**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui tingkat keaktifan pemilih PPP dalam organisasi massa yang diikutinya seperti tampak pada tabel IV.8 berikut ini :

**Tabel IV.8**

**Tingkat Keaktifan Responden dalam Organisasi Yang Diikuti**

No	Tingkat Keaktifan	Frekuensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Aktif	38	21,11%
2	Aktif	112	62,22%
3	Kurang Aktif	30	16,67%
4	Tidak Aktif	0	0%
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Tabel IV.8 menunjukkan tingkat keaktifan responden dalam organisasi yang mereka ikuti. Dari jumlah responden yang termasuk anggota dalam sebuah organisasi/perkumpulan tertentu, ternyata sebagian besar merupakan anggota yang aktif dalam organisasi tersebut, yaitu sebanyak 62,22%. Bahkan sebanyak 21,11% menyatakan bahwa mereka anggota yang sangat aktif. Sementara itu, hanya 16,67% responden yang menyatakan kurang aktif dalam organisasinya.

**A.9. Keterlibatan Responden dalam PPP**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui keterlibatan pemilih PPP dalam struktur kepengurusan PPP seperti tampak pada tabel IV.9 berikut ini :

**Tabel IV.9**

**Pemilih yang merupakan Pengurus/ Memiliki Jabatan Struktural di PPP**

No	Pengurus PPP	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ya	37	20,55%
2	Tidak	143	79,45%
Total		180	100%

*Sumber : Quesioner.*

Dari data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 20,55% responden merupakan orang yang memiliki jabatan struktural dalam PPP. Sedangkan lainnya, yaitu sebanyak 79,45%, merupakan anggota biasa.

**A.10. Alasan Responden Memilih PPP**

Dari 180 orang yang menjadi responden, dapat diketahui alasan responden dalam memilih PPP seperti tampak pada tabel IV.10 berikut ini :

**Tabel IV.10**

**Alasan Memilih PPP**

No	Alasan Memilih PPP	Frekuensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengaruh Kiai	147	81,67%
2	Pengaruh Saudara/Keluarga	62	34,44%
3	Asas Islam	179	99,44%

*Sumber : Quesioner.*

Ada berbagai alasan yang membuat warga memutuskan untuk memilih PPP. Tabel IV.10 menunjukkan bahwa 99,44% responden memilih PPP dengan alasan partai ini berasaskan Islam, dan sebanyak 81,67% responden memutuskan untuk

mencoblos PPP dengan alasan pengaruh kiai. Sementara itu, hanya 62 orang responden saja atau sekitar 34,44% yang mengaku memilih PPP karena pengaruh saudara atau keluarga.

## **B. Analisis Tipologi Pemilih PPP Jepara**

Dari urai di atas dapat diketahui bahwa tipologi pemilih PPP Kabupaten Jepara adalah ;

1. Dari segi jenis kelamin berimbang baik pria maupun wanita sama-sama memilih PPP. Hal ini bisa dilihat dari tabel IV.1 yang menunjukkan bahwa 52% pemilih PPP adalah wanita dan 48% adalah pria.
2. Dari segi usia, pemilih PPP sebagian besar merupakan pemilih yang berusia tua. Tabel IV.2 menunjukkan bahwa sekitar 63% pemilih PPP berusia lebih dari 40 tahun.
3. Dari segi agama, pemilih PPP beragama Islam. tabel IV.3 menunjukkan bahwa 100% pemilih PPP beragama Islam.
4. Dari segi pendidikan, sebagian besar pemilih PPP berpendidikan rendah. Tabel IV.4 menunjukkan bahwa 60% pemilih PPP hanya tamat SD atau hanya sekedar pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar.
5. Dari segi pekerjaan, mayoritas pemilih PPP bekerja sebagai petani. Tabel IV.5 menunjukkan bahwa 43,98% pemilih PPP bekerja sebagai petani.
6. Dari segi penghasilan, sebagian besar pemilih PPP berpenghasilan rendah. Tabel IV.6 menunjukkan bahwa 83,33% pemilih PPP berpenghasilan kurang dari Rp.1.000.000,-.

7. Dari hasil temuan penelitian juga terlihat bahwa sebagian besar pemilih PPP merupakan pengikut dari organisasi massa yang merupakan *underbow* atau berafiliasi dengan PPP. Tabel IV.7 menunjukkan bahwa 90% pemilih PPP merupakan pengikut dari organisasi massa yang merupakan *underbow* atau berafiliasi dengan PPP.
8. Dari temuan penelitian juga terlihat bahwa pemilih PPP yang menjadi pengikut ormas tersebut sebagian besar aktif di dalam kegiatan ormas yang diikutinya (62%).
9. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih PPP (79,45%) bukanlah pengurus PPP, dalam arti tidak menjabat dalam struktur organisasi PPP.
10. Penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih PPP. Faktor terpenting adalah karena PPP merupakan partai yang berbasas Islam (99,44%). Faktor kedua yang mempengaruhi pemilih memilih PPP adalah karena pengaruh kiai (81,67%), dan faktor ketiga adalah karena karena pengaruh keluarga (39,44%).

### **C. Strategi Pemenangan Pemilihan Umum**

Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan perolehan suara bagi suatu partai politik dalam sebuah pemilu adalah sangat tergantung dari kondisi suatu partai itu sendiri. Pertanyaan yang tepat untuk diajukan di sini adalah; apa kelebihan dari suatu partai, yang membuat pemilih berperilaku untuk memilihnya? Apa kekurangan dari suatu partai, yang membuat pemilih tidak memilihnya? Siapa sajakah pemilih dari suatu partai politik?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di butuhkan, dibutuhkan suatu penelitian yang tepat. Menurut **Adman Nursal** (2004:272), riset merupakan langkah penting

pertama yang harus diambil sebelum menyusun suatu strategi kampanye politik. Strategi kampanye tanpa riset, ibarat orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Menurut **Dennis Johnson**, salah satu tujuan riset adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu partai politik untuk memenangkan pemilu. Dengan kata lain, riset akan dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis SWOT (*Stength, Weaknes, Opportunity, Treaten*) terhadap diri sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tentang tipologi pemilih PPP Kabupaten Jepara di atas, maka dapat dilakukan analisis SWOT PPP sebagai berikut ini:

Pertama, analisis terhadap kekuatan (*strength*) PPP Kabupaten Jepara. Kekuatan merupakan faktor yang membuat pemilih memilih PPP. Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa, alasan terbesar pemilih memilih PPP adalah karena citra yang melekat pada PPP sebagai partai Islam. Hal ini dapat dilihat berdasarkan temuan berikut ini, *pertama*, temuan penelitian yang menunjukkan bahwa semua pemilih PPP beragama Islam (100%). *Kedua*, temuan bahwa faktor terbesar yang membuat pemilih memilih PPP adalah karena partai ini berbasas Islam, yakni sebesar 99,44%. *Ketiga*, temuan yang menyatakan bahwa alasan terbesar kedua mengapa pemilih memilih PPP adalah karena faktor kiai, yakni sebesar 81,67%. Kiai merupakan tokoh yang menjadi teladan dan sekaligus menjadi sumber ilmu pengetahuan agama islam.

Kedua, analisis terhadap kelemahan (*weakness*) PPP. Berdasarkan temuan penelitian di atas, terlihat bahwa PPP memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut: *Pertama*, sebagian besar pemilih PPP merupakan pemilih yang berusia tua. Sebesar 63% pemilih PPP berusia lebih dari 40 tahun. Ini merupakan sebuah kelemahan mengingat penganut agama Islam sebenarnya tidak hanya penduduk yang berusia tua saja, namun

juga berusia muda. *Kedua*, dari segi pendidikan, sebagian besar pemilih PPP berpendidikan rendah. Sebesar 60% pemilih PPP hanya tamat SD atau hanya sekedar pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar. Ini merupakan sebuah kelemahan mengingat penganut agama Islam tidak hanya penduduk yang berpendidikan rendah saja. *Ketiga*, dari segi penghasilan, sebagian besar pemilih PPP berpenghasilan rendah. Sebesar 83,33% pemilih PPP berpenghasilan kurang dari Rp.1.000.000,- per bulan. Ini juga merupakan sebuah kelemahan mengingat penduduk Jepara yang beragama Islam tidak hanya mereka yang berpenghasilan rendah saja.

*Ketiga*, analisis terhadap peluang. PPP memiliki peluang untuk meningkatkan perolehan suaranya pada pemilu yang akan datang karena faktor-faktor berikut ini; *pertama*, tingginya jumlah pemilih yang beragama Islam di Kabupaten Jepara. *Kedua*, masih tingginya dukungan kiai terhadap PPP serta masih kuatnya pengaruh kiai terhadap masyarakat, termasuk pula dalam hal pengarahan dukungan politis. *Ketiga*, semakin sedikitnya jumlah partai politik yang menjadi pesaing pada pemilu yang akan datang sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan *electoral treshold*.

*Keempat*, analisis terhadap ancaman. Ancaman terhadap upaya PPP untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah perolehan suara dalam pemilu muncul dari dua arah. Pertama ancaman dari dalam, yakni; *pertama*, mengingat generasi pemilih tua, yang saat ini berusia 40 tahun ke atas, semakin lama akan semakin berkurang, maka ini akan menjadi ancaman bagi PPP di masa depan. Berkurangnya generasi pemilih tua, yang kini memilih PPP, akan berimbas pada berkurangnya suara yang memilih partai. *Kedua*, ancaman berikutnya bagi PPP adalah pemilih yang sebagian besar adalah berpendidikan rendah. Pendidikan yang rendah ini membuat para pemilih ini menjadi tidak kritis dan

fanatik buta kepada kiai. Sehingga, melalui forum pengajian, mereka akan dapat dengan mudah dipengaruhi untuk memilih PPP. Hal ini akan menjadi ancaman manakala tingkat pendidikan masyarakat Jepara berubah menjadi semakin tinggi atau masyarakat menjadi semakin kritis. Mereka akan lebih sulit untuk diarahkan untuk memilih PPP. *Ketiga*, pemilih yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Ini akan menjadi ancaman manakala tingkat penghasilan penduduk meningkat menjadi semakin tinggi. *Keempat*, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai seiring dengan semakin kritisnya masyarakat pemilih dalam memandang dunia politik.

Ancaman berikutnya terhadap perolehan suara PPP adalah berasal dari luar, yakni; dari partai politik peserta pemilu lainnya yang memiliki karakteristik yang menyerupai PPP. Dalam hal ini partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB memiliki ciri yang sama dengan PPP dalam hal citranya sebagai partai Islam, NU sebagai organisasi yang membidani kelahirannya, serta kiai sebagai faktor utama yang berperan dalam menarik dukungan bagi partai.

### **C.1. Strategi Memenangkan PPP**

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi oleh PPP, maka strategi yang bisa diambil dalam hal ini adalah :

#### **a. Meningkatkan kekuatan**

Seperti telah diuraikan di atas, kekuatan PPP terletak pada citranya sebagai partai Islam. Seperti telah diuraikan dalam temuan penelitian, asas Islam yang dianut partai merupakan faktor yang menjadi pertimbangan utama para pemilih untuk memilih PPP. Untuk meningkatkan kekuatan PPP, hendaknya Islam tidak anya

menjadi asas partai saja. Namun, nilai-nilai islam hendaknya juga terwujud dalam kerja konkret partai.

Nilai Islam yang berupa keberpihakan kepada kaum *mustad'afin* (kaum marginal) misalnya terwujud dalam kerja konkret berupa; keberpihakan partai terhadap produk perundang-undang yang berpihak kepada kaum miskin, seperti adanya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan yang terjangkau, harga BBM yang murah dan sebagainya.

Nilai Islam yang mengidealkan pemimpin yang *amanah* (jujur dan dapat dipercaya) diaktualisasikan dalam wujud anggota partai PPP di legislatif yang bersih dan tidak terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lebih jauh, kepercayaan dibangun dengan menciptakan transparansi/keterbukaan partai kepada masyarakat. Hal ini, misalnya, dilakukan dengan menyampaikan kepada para pemilih tentang apa-apa yang telah dilakukan partai dan para pengurusnya yang duduk di Legislatif, apa-apa yang belum dilakukan, dari mana dana partai didapatkan, digunakan untuk apa dana itu, termasuk juga yang berasal dari gaji pengurus partai yang berada di legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian, transparansi ini juga akan mendorong terwujudnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) partai kepada publik.

Aktualisasi nilai-nilai islam yang lain, seperti keadilan, kasih sayang, keagungan dan lain-lain, secara konseptual, juga diwujudkan dalam indikator-indikator yang konkret, terukur dan, secara nyata diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan partai dan perilaku para anggotanya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pemilih kepada masyarakat akan semakin meningkat.

b. Meminimalisir kelemahan

Salah satu kelemahan utama PPP adalah bahwa partai ini kurang populer di hadapan pemilih muda. Seperti telah disampaikan, sebagian besar pemilih PPP berusia tua (40 tahun ke atas) yakni sebesar 63%. Untuk itu, perlu dilakukan suatu upaya untuk menggalang dukungan suara pemilih muda dan pemilih pemula ini.

Tingginya pilihan kepada PPP yang berasal dari golongan tua terciptakan karena mereka merupakan kelompok yang tekun mengikuti pengajian. Melalui pengajian ini lah, para kiai PPP menggalang dukungan politik masyarakat. Namun, pengajian ini tidak populer di kalangan muda. Hanya sedikit dari kaum muda yang mengikuti pengajian secara tekun.

Untuk menggalang dukungan pemuda, ada dua strategi yang dapat dilakukan PPP; *pertama*, memodifikasi pengajioan sedemikian rupa sehingga menarik minat kaum muda. *Kedua*, membentuk ajang lain yang dapat meningkatkan minat kaum muda dan menjadi wadah bagi mereka.

c. Memperbesar peluang

Memperbesar kekuatan dan meminimalisir kelemahan sebagaimana telah diungkapkan dalam bagian berikutnya, maka otomatis hal ini akan memperbesar peluang PPP untuk memenangkan pemilu.

d. Meminimalisir ancaman

Seperti telah diuraikan sebelumnya, ancaman terhadap perolehan suara PPP bersal dari dalam dan dari luar partai. Ancaman dari dalam bermuara pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap PPP. Sedangkan ancaman dari luar berwujud kehadiran pesaing yang merebut dukungan konstituen partai.

Untuk mengatasi ancaman dari dalam, maka yang dapat dilakukan adalah pembennahan internal PPP yang akan dapat memperbesar kepercayaan masyarakat terhadap PPP. Kepercayaan masyarakat terhadap partai akan terwujud manakala faktor-faktor yang memeperkuat partai sebagaimana diungkapkan di atas ditingkatkan lagi.

### **C.2. Positioning Sebagai Strategi Menangkis Ancaman Dari Luar**

Salah satu ancaman bagi perolehan suara PPP bersal dari partai yang memiliki karakteristik yang sama dengannya, yakni PKB. Baik PPP dan PKB sama-sama memperebutkan konstituen yang sama dalam pemilu; yakni kaum islam tradisional. Berdasarkan data perolehan suara, penurunan suara PPP selalu diirngi dengan peningkatn perolehan suara PKB. Oleh karena itu, agar mampu mengatasi ancaman PKB ini, PPP harus memiliki suatu faktor pembeda yang tidak dimiliki oleh PKB. Faktor pembeda ini penting sebagai nilai lebuah yang akan membuat pemilih lebih memilih PPP daripada PKB. Sesungguhnya, faktor pembeda ini juga penting untuk digunakan tidak hanya untuk bersaing dengan PKB, tetapi juga dengan kotestan peserta pemilu yang lain.

Untuk menciptakan pembeda itu, maka PPP membutuhkan *positioning*. Dalam disiplin *marketing*, menempatkan seorang kandidat atau sebuah partai dalam pikiran para pemilih disebut *positioning*. Lebih dari itu, *positioning* merupakan tindakan untuk menetapkan citra tertentu ke dalam benak para pemilih agar tawaran produk dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas dan bermakna. Menurut **Plasser**

(dalam Nursal : 2004 : 27), sebanyak 66% dari konsultan kampanye politik di Eropa Brat dan 70% dari konsultan kampanye politik di Amerika Serikat mengakui *positioning* sebagai salah satu faktor yang menentukan kesuksesan kampanye.

*Positioning* yang efektif akan menunjukkan perbedaan nyata dan keunggulan kontestan dibanding dengan kontestan pesaing. *Positioning* secara tidak langsung juga mendefinisikan pesaing; bahwa pesaing tidak dapat mewujudkan tawaran-tawaran tertentu sebagai pihak yang mencanangkan *positioning* tersebut.

Posisi yang khas, jelas dan penuh makna dari kontestan bersumber dari faktor-faktor pembeda yang dimiliki oleh kontestan tersebut dibandingkan dengan kontestan lain. Tetapi tidak semua faktor pembeda yang dimiliki oleh kontestan itu akan menghasilkan *positioning* yang efektif. Dalam hal ini, setidaknya perlu enam syarat agar sebuah perbedaan itu menjadi berharga:

1. Penting

Perbedaan itu harus dinilai penting bagi para pemilih. Dalam hal ini, asas Islam yang dimiliki oleh PPP merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat Jepara. Identitas PPP sebagai partai Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi para pemilih di Jepara.

2. Istimewa

Faktor pembeda bersifat istimewa, dalam arti tidak dimiliki oleh pihak lain. Namun, satu atau beberapa faktor yang juga dimiliki oleh pihak pesaing, masih bisa dijadikan sumber pembeda asalkan faktor tersebut diwujudkan dengan cara yang berbeda dengan pihak pesaing.

Citra sebagai partai Islam merupakan sesuatu yang istimewa bagi partai tersebut. Dalam hal ini, PPP masih harus memberi faktor tambahan lain, mengingat citra sebagai partai Islam tidak hanya dimiliki oleh PPP saja, namun juga dimiliki oleh partai lain seperti PKB, PKS dan PBR. Faktor tambahan itu dapat berupa teraktualisasikannya nilai-nilai Islam kedalam kebijakan partai dan perilaku para anggotanya, seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

### 3. Superior

Perbedaan yang dimunculkan harus memberikan suatu manfaat yang lebih baik ketimbang cara-cara lain untuk menghasilkan manfaat yang sama. Dalam hal ini, mewujudkan partai Islam yang benar-benar mengaktualisasikan nilai-nilai Islam memiliki manfaat yang lebih baik daripada hanya mengandalkan asas Islam saja.

### 4. Dapat dikomunikasikan

*Positioning* itu mudah dipahami pemilih dan dikomunikasikan dengan berbagai media komunikasi. Dalam hal ini, komitmen PPP untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam kedalam kebijakan partai dan perilaku para anggotanya harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Cara terbaik untuk membuat masyarakat mengerti akan hal ini adalah dengan tindakan nyata, misalnya perilaku para anggota legislatif PPP yang sederhana, menolak pemberian mobil mewah, tidak melakukan KKN, mempublikasikan laporan keuangan partai dan kinerja PPP kepada masyarakat melalui media massa pada setiap akhir tahun, memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berupa produk perundang-undangan yang memihak masyarakat seperti pelayanan pendidikan

dasar gratis, pelayanan kesehatan gratis dan memperjuangkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau.

5. *Pre emptive*

Perbedaan tersebut tidak mudah untuk ditiru oleh pihak lain. Dalam hal ini, citra sebagai partai Islam sebenarnya sudah cukup sulit oleh partai-partai politik peserta pemilu yang lain. Dengan ditambahkan faktor-faktor istimewa seperti telah diungkapkan di atas, akan membuat PPP semakin memiliki faktor *pre emptive* yang tidak mudah ditiru.

6. Jumlah pemilih signifikan

*Positioning* tersebut pada akhirnya harus dapat meraih suara sesuai dengan sasaran objektif yang diinginkan. Suatu tawaran pembeda tidak akan ada artinya jika tidak akan berdampak pada peningkatan perolehan suara pemilih sebagai sasaran dari *positioning*. Dalam hal ini, citra PPP sebagai partai Islam dan diiringi dengan aktualisasi nilai-nilai Islam diharapkan akan berdampak pada peningkatan perolehan suara PPP.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa *positioning* tidak dapat dipisahkan dengan analisa atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman partai, dan harus didasarkan pula pada identifikasi tipologi pemilih PPP itu sendiri. Muara dari analisis ini adalah adanya suatu perbaikan internal partai yang nyata ke arah yang diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, sebagaimana terurai berikut ini:

1. Tipologi pemilih PPP Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut;
  11. Dari segi jenis kelamin, baik pemilih pria maupun wanita memiliki komposisi berimbang.
  12. Dari segi usia, pemilih PPP sebagian besar merupakan pemilih yang berusia tua.
  13. Dari segi agama, pemilih PPP beragama Islam.
  14. Dari segi pendidikan, sebagian besar pemilih PPP berpendidikan rendah.
  15. Dari segi pekerjaan, mayoritas pemilih PPP bekerja sebagai petani.
  16. Dari segi penghasilan, sebagian besar pemilih PPP berpenghasilan rendah.
  17. Dari hasil temuan penelitian juga terlihat bahwa sebagian besar pemilih PPP merupakan pengikut dari organisasi massa yang merupakan *underbow* atau berafiliasi dengan PPP.
  18. Dari temuan penelitian juga terlihat bahwa pemilih PPP yang menjadi pengikut ormas tersebut sebagian besar aktif di dalam kegiatan ormas yang diikutinya.
  19. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih PPP bukanlah pengurus PPP, dalam arti tidak menjabat dalam struktur organisasi PPP.
  20. Penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih PPP, yakni; berasas Islam, pengaruh kiai dan pengaruh keluarga.

2. Untuk mempertahankan pemilih yang telah ada, PPP perlu mempertahankan citranya sebagai partai Islam dengan asas Islam dan kiai sebagai dua faktor penting yang menjadi pendongkrak citranya itu.
  - a. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memenangi perolehan suara dalam Pemilu yang akan datang PPP adalah dengan melakukan *positioning*. *Positioning* merupakan upaya untuk menetapkan citra tertentu ke dalam benak para pemilih agar tawaran produk dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas dan bermakna. *Upaya positioning* ini harus didasarkan atas temuan penelitian dan hasil analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi partai.

# LAMPIRAN

## **LAMPIRAN I**

### **QUESTIONER**

#### **PEMETAAN TIPOLOGI PEMILIH PARTAI PERSATUAN**

#### **PEMBANGUNAN (PPP) DI JEPARA**

#### **(Sebuah Strategi Pemenangan Pemilu 2009)**

---

#### **Keterangan:**

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan benar.

Lingkarilah salah satu huruf, a, b, c, d, e, f atau g yang Anda anggap benar.

#### **Pertanyaan Pendahuluan :**

Apakah partai yang anda pilih pada Pemilu 2004 yang lalu:

- a. PPP
- b. Selain PPP

(Jika jawabannya adalah a (memilih PPP), silakan melanjutkan menjawab pertanyaan berikut)

#### **Pertanyaan Inti:**

1.Nama :

2.Alat :  
2.Alamat :

3.Jenis Kelamin:

- a. Pria
- b. Wanita

4. Usia (min 17 th) :

- a. 17-20 tahun
- b. 21-25 tahun
- c. 26-30 tahun
- d. 31-40 tahun
- e. 41-45 tahun
- f. 45-50 tahun
- g. >51 tahun

5. Agama:

- a. Islam
- b. Non Islam

6. Pendidikan Terakhir:

- a. SD / MI (termasuk tidak tamat SD)
- b. SMP / MI (termasuk tidak tamat SMP)
- c. SMA / MA (termasuk tidak tamat SMA)
- d. Sarjana (S1, S2, S3)

7. Pekerjaan:

- a. PNS
- b. Pedagang
- c. Petani
- d. Pengusaha
- e. Lainnya, sebutkan.....

8. Penghasilan per bulan:

- a. <1.000.000
- b. >1.000.000-2.000.000
- c. >2.000.000-3.000.000
- d. >3.000.000

9. Menjadi anggota/pengikut organisasi/kumpulan pengajian/jam'iyah tertentu:

- a. Ya, sebutkan.....
- b. Tidak

10. Jika jawaban atas pertanyaan no. 10 adalah: ya, apakah anda aktif dalam organisasi/kumpulan pengajian/jam'iyah tersebut:

- a. Sangat aktif
- b. Aktif
- c. Kurang
- d. Tidak Aktif

11. Apakah anda merupakan pengurus (memiliki jabatan dalam struktur) PPP?

- a. Ya
- b. Tidak

12. Apakah alasan anda memilih PPP? (boleh memilih lebih dari 1)

- a. Pengaruh Kiai
- b. Pengaruh saudara/keluarga
- c. Berasaskan islam
- d. Alasan lain....

